

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **5.1. Deskripsi Daerah Penelitian**

##### **5.1.1. Kondisi Umum Provinsi Kalimantan Selatan**

Secara administratif Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukotanya Banjarmasin, terbagi dalam 11 (sebelas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Tanah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebagian masih berupa hutan, dan banyak dialiri oleh sungai besar dan kecil. Sungai-sungai tersebut antara lain adalah Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Balangan, Sungai Amandit, Sungai Negara, Sungai Batang Alai, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, dan lain sebagainya. Pada umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal di Pegunungan Meratus, dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar. Sebagian besar dari sungai-sungai tersebut masih menjadi sarana transportasi penduduk dan angkutan barang.

Berdasarkan luas wilayah, daerah yang mempunyai luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%). Sedangkan daerah yang wilayahnya terkecil adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru sebesar 0,97% (BPS Kalsel Dalam Angka 2013). Perkebunan yang telah ada dan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah karet, kelapa, cengkeh, kemiri, sagu, purun danau, kelapa sawit, cokelat, kuli, manis. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar, meliputi perikanan darat maupun perikanan laut yang banyak dijumpai di kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan kabupaten Kotabaru. Hasil perikanan darat dan laut seperti udang, kepiting, ubur-ubur, kakap, sirip hiu, tongkol, dan sebagainya, umumnya di ekspor keluar negeri, terutama Jepang, dan Hongkong. Sementara flora dan fauna yang menjadi ciri khas Provinsi Kalimantan Selatan adalah buah Kasturi (*Mangifera casturi*), dan Bekantan (*Nasalis Larvatus*), yaitu jenis kera berhidung panjang/mancung, yang banyak dijumpai di sekitar hutan bakau perairan ambang Barito.

Provinsi Kalimantan Selatan juga mempunyai berbagai jenis tambang, seperti minyak tanah, emas, intan, batu semen, biji besi, dan batubara. Di antara jenis tambang tersebut, yang sudah banyak di ekspor adalah biji besi dan batubara. Potensi batubara menyebar di seluruh Kabupaten. Sumber daya alam, khususnya batubara banyak terdapat di Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kabupaten

Kotabaru. Perusahaan terbesar yang mengeksploitasi batubara di Provinsi Kalimantan Selatan adalah PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, serta PT Bahari Cakrawala Sebuku. Deposit batubara Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai 1,8 miliar ton, dengan produksi rata-rata mencapai 12 juta ton per tahun (BPS Kalsel, 2015).

Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki potensi ekonomi dan perdagangan yang cukup baik dan prospektif. Hal ini tidak terlepas dari letak geografisnya yang cukup strategis. berbatasan langsung dengan laut Jawa dan selat Sulawesi Sehingga menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang perdagangan bagi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Sebagai salah satu daerah tujuan investasi, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang. Sarana tersebut di antaranya adalah bandara Syamsudin Noor di kota Banjarbaru, bandara Stagen di Kabupaten Kotabaru, bandara Warukin di Tanjung Kabupaten Tabalong, pelabuhan Tri Sakti di Banjarmasin, pelabuhan Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu, pelabuhan Kotabaru di Kabupaten Kotabaru, serta pelabuhan samudera Tabonio di Kabupaten Tanah Laut.

### **5.1.2. Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan.**

Salah satu indikator yang dapat memperlihatkan pemerataan kemampuan ekonomi wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah selama satu tahun. Melalui analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dapat diketahui aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu wilayah/daerah. Daerah yang mempunyai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tinggi merupakan suatu indikasi bahwa kegiatan dan kemampuan daerah tersebut tinggi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Kemampuan tersebut merupakan potensi yang memungkinkan daerah tersebut semakin berkembang. Meski demikian, perbedaan dalam menciptakan kemampuan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) antar Kabupaten/Kota tidak dapat langsung dibandingkan. Hal ini disebabkan kemampuan dalam menciptakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayah suatu Kabupaten/Kota, semakin besar pula kemungkinan menciptakan nilai tambah, demikian pula jika jumlah penduduknya lebih besar dibanding daerah lainnya.

Sampai akhir tahun 2015, kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan keadaan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat

dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, dan pertumbuhan PDRB yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1.  
Perkembangan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2000  
Periode Tahun 2007 – 2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp.)	Pertumbuhan (%)
2007	Rp. 25.922.287,52	6,01
2008	Rp. 27.538.452,00	6,23
2009	Rp. 29.051.631,00	5,49
2010	Rp. 30.674.123,86	5,58
2011	Rp. 32.552.849,54	6,12
2012	Rp. 34.413.316,67	5,71
2013	Rp. 36.196.218,23	5,18
2014	Rp. 38.125.476,41	5,33
2015	Rp. 39.970.749,03	4,84

Sumber : BPS Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Berdasarkan Tabel 5.1 tersebut di atas, perkembangan PDRB terlihat mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 nilai PDRB Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp.25.922.287,52. Kemudian pada tahun 2008, naik menjadi Rp. 27.538.452,00 atau meningkat sebesar 6,23 %. Selanjutnya tahun 2009 naik menjadi Rp. 29.051.631,00, atau meningkat sebesar 5,49 %. Tahun 2010 PDRB naik lagi menjadi sebesar Rp. 30.674.123,86,- atau meningkat sebesar 5,58 %. Pada tahun 2011 menjadi Rp. 32.552.849,54 atau naik sebesar 6,12 %. Pada tahun 2012 menjadi Rp. 34.413.316,67 atau naik 5,71%. Pada tahun 2013 menjadi Rp. 36.196.218,23 atau naik 5,18%. Tahun 2014 menjadi Rp. 38.125.476.41 atau naik 5,33%. Tahun 2015 menjadi Rp. 39.970.749,03 naik hanya 4,84% Secara keseluruhan selama periode tahun 2007-2015, rata-rata kenaikan PDRB mencapai 5,61 %.

### 5.1.3. Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa, jumlah penduduk yang besar akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan, apabila penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik. Begitu pun sebaliknya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 1980, penduduk Kalimantan Selatan berjumlah 2.061.649 jiwa, kemudian pada tahun 1990 bertambah jumlahnya menjadi 2.596.647 jiwa, dan

pada tahun 2000 jumlahnya meningkat menjadi 3.202.300 jiwa. Menurut Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai sebesar 3.626.616 jiwa, sedangkan pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan mencapai sebesar

Perkembangan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 1980 - 2010 disajikan dalam Tabel 5.2. berikut ini:

Tabel 5.2.  
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota (Dalam Jiwa)  
Periode Tahun 1980 – 2015

No	Kabupaten/Kota	Penduduk				
		1980	1990	2000	2010	2015
1	Kab Tanah Laut	122.929	183.397	265.100	296.333	324.283
2.	Kab Tanah Bumbu	-	-	-	267.929	325.115
3.	Kab Kotabaru	193.650	306.851	470.600	290.142	320.208
4	Kab Banjar	347.600	442.510	543.100	506.839	554.443
5.	Kab Tapin	108.573	126.625	142.400	167.877	181.778
6.	Kab Hulu Sungai Selatan	175.769	184.903	194.800	212.485	227.153
7.	Kab Hulu Sungai Tengah	200.426	220.750	233.900	243.460	260.292
8.	Kab Balangan	-	-	-	112.430	123.449
9.	Kab Hulu Sungai Utara	239.525	273.890	301.400	209.246	225.385
10	Kab Tabalong	124.939	151.835	178.200	218.620	239.593
11	Kota Banjarbaru	-	-	124.375	199.627	234.371
12	Kab Barito Kuala	169.952	255.149	287.700	276.147	298.282
13	Kota Banjarmasin	381.286	480.737	585.100	625.481	675.440
	Kalsel	2.064.649	2.596.647	3.202.300	3.626.616	3.989.793

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

**Berdasarkan Tabel 5.2. tersebut di atas terlihat, bahwa persebaran penduduk** terpusat di Kota Banjarmasin (**16,92%**), Kabupaten Banjar (**13,89%**), Kabupaten Tanah Laut (**8,12%**), Kabupaten Kotabaru (**8,02 %**). Sedangkan sebaran penduduk di daerah lainnya masih di bawah 8%. Banyaknya penduduk yang tinggal di daerah tersebut di atas, tidak terlepas dari peran ketiga daerah ini dalam kegiatan perekonomian bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan bisnis dan perdagangan. Sedangkan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru merupakan daerah penempatan transmigrasi dan Pertambangan seperti intan, biji besi, dan batubara, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Kabupaten Balangan merupakan pemekaran dari kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten pemekaran dan Kabupaten Kotabaru yang terbentuk berdasarkan SK Presiden RI tanggal 25 Februari 2003.

Perkembangan pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 1980-2010 disajikan dalam Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3.  
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 1980 – 2015

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Pertumbuhan (Dalam %)				
		1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2015
1.	Kab Tanah Laut	5,21	4,08	4,45	2,51	1,72
2.	Kab Kotabaru	3,22	4,71	5,34	2,50	1,90
3.	Kab Tanah Bumbu	-	-	-	3,74	3,82
4.	Kab Banjar	2,20	2,44	2,27	2,08	1,72
5.	Kab Tapin	2,82	1,55	1,26	1,72	1,52
6.	Kab Hulu Sungai Selatan	0,66	0,51	0,54	0,85	1,28
7.	Kab Hulu Sungai Tengah	0,25	0,97	0,60	0,84	1,29
8.	Kab Hulu Sungai Utara	0,89	1,35	1,00	0,61	1,44
9.	Kab Tabalong	0,92	1,97	1,74	2,51	1,75
10.	Kab Balangan	-	-	-	1,59	1,82
11.	Kota Banjarbaru	-	-	-	4,84	3,10
12.	Kab Barito Kuala	3,16	2,85	1,28	1,14	1,48
13.	Kota Banjarmasin	3,38	2,34	2,17	1,70	1,46
Kalsel		2,16	2,32	2,33	1,98	1,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.3 tersebut di atas, secara umum, pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan cukup tinggi, dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk secara nasional. Pada periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk mencapai sebesar 2,16%, sedikit lebih rendah daripada angka nasional yang besarnya mencapai 2,32%. Namun pada periode berikutnya 1980-1990, pertumbuhan penduduk naik menjadi 2,32%, sementara laju pertumbuhan penduduk Indonesia hanya sebesar 1,97%. Sementara itu laju pertumbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP-2000) yang dilaksanakan oleh BPS, untuk periode 2000-2010 besarnya mencapai 1,49 % sedangkan laju pertumbuhan nasional sebesar 1,45 %. Pada periode 2010-2015 sebesar 1,48 % sedangkan pertumbuhan nasional 1,27%

Relatif tingginya pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terlepas dari kedudukannya sebagai salah satu daerah penerima transmigrasi, di samping masih tingginya angka pertumbuhan alamiah. Sedangkan relatif rendahnya pertumbuhan penduduk pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah, karena faktor mobilitas penduduk, di mana penduduknya

dikenal sebagai perantau. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, dapat menimbulkan berbagai masalah pembangunan. Masalah yang timbul dapat berupa terhambatnya usaha peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, baik berupa pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

#### 5.1.4. Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan.

Masalah ketenagakerjaan menjadi penting untuk dikaji lebih jauh. Hal ini disebabkan karena dampaknya yang cukup besar terhadap munculnya masalah sosial dan perekonomian di suatu daerah. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai. Hal ini akan membawa dampak terhadap penyerapan angkatan kerja yang masuk dalam pasar kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, yang terus bertambah sejalan dengan penambahan penduduk.

Gambaran perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2011-2015 (Dalam Jiwa)

Lapangan Usaha	T a h u n				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	834.685	867.042	901.423	937.973	974.533
pertambangan & Galian	66.497	69.497	77.876	76.395	74.914
Industri	127.743	128.742	129.847	131.059	132.271
Listrik & Air bersih	4.608	4.836	5.000	5.341	5.682
Bangunan	67.374	72.057	77.159	82.724	88.289
Perdagangan, Rest, Hotel	307.322	318.322	330.070	342.620	355.170
Pengangkutan &					
Komunikasi	95.633	98.800	102.132	105.641	109.150
Keuangan	11.209	11.907	12.664	13.487	14.310
Jasa-jasa	217.872	227.149	237.012	247.503	257.994
Jumlah	1.732.944	1.798.438	1.868.764	1.942.742	2.012.303

Sumber: DisnakerTrans Provinsi Kalsel, 2016

Berdasarkan Tabel 5.4 tersebut di atas, terlihat bahwa penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang bekerja, tersebar di berbagai sektor/lapangan pekerjaan. Sektor/lapangan pekerjaan yang terbesar adalah sektor pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan angkutan. Namun demikian sektor pertambangan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini.

#### 5.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan.

Salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang

terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang-barang jasa (*output*), yang pada gilirannya proses ini tentunya juga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk. Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2011 - 2015, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan terus bergerak positif. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 6,06 %. Kemudian meningkat menjadi sebesar 6,12 % pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 2011-2015 mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan pertumbuhan ekonomi secara sektoral disajikan dalam Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5.

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (Dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	3,03	2,60	3,52	6,46	7,05
2.	Pertambangan & Galian	8,67	-2,55	1,01	0,88	-8,47
3.	Industri Pengolahan	3,23	3,24	3,16	6,83	7,62
4.	Listrik & Air bersih	8,02	0,69	-2,12	15,39	26,38
5.	Bangunan	7,01	2,86	3,36	8,29	8,70
6.	Perdagangan, Restoran & Hotel	7,32	5,70	3,35	6,70	7,27
7.	Pengangkutan & Komunikasi	6,52	4,54	6,03	8,15	6,60
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	6,71	8,12	5,12	6,02	5,42
9.	Jasa-jasa	9,44	3,27	3,42	8,99	9,34
Kalsel		8,25	1,96	3,07	5,28	3,23

Sumber : BPS : Provinsi Kalsel, 2016

Berdasarkan Tabel 5.5 tersebut di atas terlihat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 9,44 %. Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan & galian sebesar 8,67 %, dan sektor listrik & air bersih dengan pertumbuhan sebesar 8,02%. Sedangkan sektor pertanian mengalami perlambatan, di mana dalam tahun 2011 pertumbuhannya hanya mencapai sebesar 3,03 %. Berikutnya diikuti oleh sektor keuangan dan jasa perusahaan yang pertumbuhan pada tahun 2011 hanya mencapai 6,71 %. Pada tahun 2011 Sektor pertanian dan

industri pengolahan tingkat pertumbuhannya hanya mencapai masing-masing 3,03 % dan 3,23 %.

## **5.2. Kondisi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan**

### **5.2.1. Kabupaten Tanah Laut**

Kabupaten Tanah laut merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukotanya terletak di Pleihari. Secara geografis daerah ini terletak pada 114° 30 20 - 115° 23 31 Bujur Timur dan 3° 30 33 - 4° 11 38 Lintang Selatan., dengan luas sekitar 3.631,35 KM<sup>2</sup>. Secara administratif terbagi dalam 135 Kelurahan/Desa, serta 11 (sebelas) Kecamatan, yaitu Kecamatan Penyipatan, Kecamatan Jorong, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kintap, Kecamatan Pleihari, Kecamatan Takisung, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Bajuin.

Kabupaten Tanah Laut mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, terutama pengembangan sektor pertanian. Selain pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung dan palawija, juga sub sektor perkebunan antara lain, perkebunan karet, kelapa, dan kelapa sawit, serta buah-buah seperti semangka, melon. Para petani di Kabupaten Tanah laut ini, selain mengolah tanah pertanian, juga memelihara ternak, khususnya sapi. Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan di samping memberikan nilai tambah terhadap komoditas tersebut, juga dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Peluang lain di sektor pertanian adalah di sub sektor perikanan, selain sebagai petani, penduduk Kabupaten Tanah Laut juga bekerja sebagai nelayan serta pengembangan budi daya perikanan darat melalui kolam dan tambak, seperti udang, nila, patin. Bawal. Dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan ini dapat menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk menunjang perekonomian daerah, keberadaan infrastruktur khususnya jalan darat yang memadai lebih memudahkan masyarakat serta pelaku bisnis untuk berinteraksi, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa. Akses jalan darat dapat dilakukan hingga mencapai wilayah provinsi Kalimantan Timur. Daerah ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung yang memadai, berupa listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, serta pelabuhan samudera Tabonio.

#### **5.2.1.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Laut**

Proses pembangunan ekonomi, biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan-perubahan dalam struktur perekonomian. Perubahan struktur ini sebenarnya terjadi karena adanya interaksi antara 2 (dua) proses, yaitu, proses akumulasi (pembentukan modal) dan perubahan dalam konsumsi masyarakat. Hal



ini adalah akibat adanya kenaikan dalam pendapatan per kapita masyarakat, dan perubahan pola permintaan.

Struktur perekonomian yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor tersebut.

Memperhatikan peranan masing-masing sektor ekonomi, mempunyai peran penting dalam rangka penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan sektor- sektor ekonomi di masing-masing daerah. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tanah Laut selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.6 Berdasarkan Tabel 5.6. terlihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tanah laut selama rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2015, tidak menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Dalam hal ini, sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian, masih didominasi oleh sektor-sektor, pertanian, sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan.

Tabel 5.6

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Laut Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	31,97	32,27	31,58	30,99	31,16
2.	Pertambangan & Galian	9,22	8,38	8,44	8,49	9,94
3.	Industri Pengolahan	19,15	19,01	19,54	20,06	16,31
4.	Listrik & Air bersih	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17
5.	Bangunan	2,31	2,13	2,23	2,33	2,33
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	23,65	24,97	24,69	24,37	24,52
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,81	1,87	1,86	1,85	1,76
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	3,64	3,39	3,46	3,52	3,85
9.	Jasa-jasa	8,11	7,83	8,04	8,24	9,96
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Laut, 2016

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mengubah struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Guna mencapai hal tersebut dibutuhkan investasi yang cukup besar, dan perubahan teknologi. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang, cukup sulit untuk melakukan hal tersebut. Hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah mengidentifikasi keunggulan-keunggulan secara sektoral. Langkah selanjutnya

adalah melakukan penguatan/revitalisasi terhadap sektor unggulan daerah, disertai dengan kebijakan lainnya, baik di bidang investasi maupun infrastruktur. Sehingga sektor-sektor unggulan tersebut dapat menjadi kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Tanah Laut.

#### 5.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung dari perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Melalui perkembangan PDRB harga konstan, tercermin pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu. Dalam hal ini pengaruh perubahan harga (inflasi) telah ditiadakan waktu 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.7 dibawah ini :

Tabel 5.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Laut Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,95	1,84	3,03	1,76	2,35
2.	Pertambangan & Galian	6,22	8,89	4,94	(0,91)	(2,22)
3.	Industri Pengolahan	9,98	5,11	4,67	4,64	4,34
4.	Listrik & Air bersih	6,86	6,96	5,83	18,14	25,30
5.	Bangunan	7,88	6,13	5,75	6,47	6,34
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,04	6,65	8,54	8,76	8,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	5,35	6,00	7,12	6,76	6,97
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	7,16	4,11	10,03	3,12	3,95
9.	Jasa-jasa	7,74	6,73	9,62	9,32	10,71
		5,26	5,82	6,56	6,65	7,82

Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa selama rentang waktu tahun 2011 - 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut bergerak positif. Secara sektoral, dapat dilihat bahwa semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan dengan besaran yang berbeda-beda. Pada tahun 2015, sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 2,35 % Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai sebesar 2,13%. Sedangkan sektor pertambangan & galian mengalami penurunan, di mana pada tahun 2010 mencapai sebesar 5,98% Tetapi pada tahun 2015 menurun mencapai sebesar (2,22 %).

Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 pertumbuhannya mencapai sebesar 4,34%, lebih tinggi

dibanding tahun 2011, di mana pertumbuhannya mencapai sebesar 9,87% Sedangkan sektor jasa-jasa, pada tahun 2015 pertumbuhannya meningkat sebesar 10,71%, daripada tahun 2011 dengan pertumbuhan hanya sebesar 7,67%.

#### 5.2.2. Kabupaten Tanah Bumbu

Secara geografis Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara  $2^{\circ} 52'$  -  $3^{\circ} 47'$  Lintang Selatan dan  $105^{\circ} 15'$  -  $116^{\circ} 04'$ - Bujur Timur. Kabupaten Tanah Bumbu terletak di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 5.066,96 KM<sup>2</sup> Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu, Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Batulicin, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Mentewe, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Angsana. Potensi terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Bumbu adalah pertambangan, khususnya batubara serta perikanan laut. Selain itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga mempunyai potensi yang baik terhadap pengembangan sektor perkebunan karet dan kelapa sawit, peternakan khususnya sapi, serta budi daya perikanan darat. Dalam budi daya perikanan darat, tidak hanya mengembangkan budi daya udang, patin, bawal melalui sistem tambak, tetapi juga pengembangan budi daya ikan lokal seperti gabus dan papuyu (ikan betok)

##### 5.2.2.1. Struktur Perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu.

Besaran nilai PDFB (Produk Domestik Regional Bruto) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah (*value added*) bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Struktur ekonomi menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap sektor ekonomi. Struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah (*Value Added*) yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Regional Domestik Bruto), maka dapat diketahui seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah bersangkutan. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu selama kurun waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011- \_ 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	16,08	14,90	15,60	16,20	17,10
2.	Pertambangan & Galian	42,88	50,90	48,30	46,00	41,10
3.	Industri Pengolahan	7,22	6,00	6,40	6,70	7,40
4.	Listrik & Air bersih	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10
5.	Bangunan	5,19	5,10	5,40	5,50	6,10
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	10,32	11,30	10,50	11,30	12,40
7.	Pengangkutan & Komunikasi	13,24	6,60	8,20	8,40	8,80
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	1,32	1,20	1,30	1,40	1,50
9.	Jasa-jasa	3,64	3,90	4,20	4,40	5,50
		100,00	100	100	100	100

Sumber : BPS : Kabupaten Tanah Bumbu, 2016

Berdasarkan Tabel 5.8, terlihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, di mana struktur perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu didominasi oleh sektor-sektor pertambangan & galian, pertanian, pengangkutan, perdagangan, dan sektor industri pengolahan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor pertambangan & galian perannya terus meningkat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, mengingat sektor pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa mendatang, apabila tidak segera ditangani secara baik.

#### 5.2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung berdasarkan perkembangan PDRB (Produk Domestik regional Bruto) atas dasar harga konstan Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, disajikan dalam Tabel 5.9. berikut ini:

Tabel 5.9  
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Harga Konstan Tahun  
2010 Periode Tahun 2011- 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	6,93	3,20	8,20	5,90	5,90
2.	Pertambangan & Galian	7,76	7,20	(0,3)	1,60	(0,4)
3.	Industri Pengolahan	2,93	8,10	10,50	5,30	4,60
4.	Listrik & Air bersih	2,62	11,10	14,80	15,50	25,40
5.	Bangunan	5,06	6,70	5,80	0,90	3,70
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,80	5,20	8,40	7,60	7,80
7.	Pengangkutan & Komunikasi	6,74	6,70	6,90	6,40	6,70
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	7,22	8,30	8,80	8,70	8,00
9.	Jasa-jasa	8,43	11,00	11,70	14,9	16,50
Tanah Bumbu		6,58	6,30	3,80	3,60	3,00

Sumber: BPS : Kabupaten Tanah Bumbu, 2016

Selama rentang waktu tahun 2011-2015, kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kinerja yang cukup baik terutama sampai dengan tahun 2015. Semua sektor ekonomi tumbuh secara positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2015 mencapai sebesar 6,58%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2011 yang besarnya hanya mencapai sebesar 6,45%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 8,43%.. Kemudian diikuti oleh sektor pertambangan & galian sebesar 7,76%, sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan sebesar 7,22%. Berikutnya adalah sektor pertanian sebesar 6,93%, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 6,80 %. Namun menurun semenjak tahun 2013.

Sementara itu, angka pertumbuhannya sektor-sektor lainnya masih di bawah 6% per tahun. Namun demikian pertumbuhan sektor pertanian 1,2% lebih cepat dibanding tahun 2011. Percepatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi pada sub-sektor perkebunan dan perikanan. Keadaan ini cukup menggembirakan, mengingat perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu sampai sekarang masih bertumpu pada sektor pertambangan & galian. Sektor ini merupakan *leading sector* bagi Kabupaten Tanah Bumbu.

Karena itu sudah saatnya pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tidak lagi terlalu menggantungkan perekonomiannya kepada kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Secara ekonomi, dalam jangka pendek keunggulan komparatif yang dimiliki berupa Batubara akan menguntungkan perekonomian daerah. Namun perlu diingat bahwa sumber daya alam berupa batubara tersebut adalah sumber

daya/*resources* yang tidak dapat diperbaharui keberadaannya. Eksploitasi secara besar-besaran dapat merusak lingkungan bila tidak ditangani secara baik.

### 5.2.3. Kabupaten Kotabaru

Posisi **Kabupaten Kotabaru terletak** di sisi tenggara **wilayah** Provinsi Kalimantan Selatan, dengan titik koordinat di antara  $2^{\circ} 20' - 4^{\circ} 56'$  Lintang Selatan, dan  $115^{\circ} 29' - 116^{\circ} 30'$  Bujur Timur, dengan ibukotanya Kotabaru. Secara geografis, kabupaten Kotabaru mempunyai wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kurang lebih 9.442,46 KM. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut di antaranya adalah Pulau Laut, Pulau Sebuku, Pulau Kunyit, dan Pulau Sewangi Kabupaten Kotabaru terbagi dalam 20 Kecamatan dan 195 Desa/Kelurahan. Kabupaten Kotabaru terletak berada pada posisi persilangan negara Republik Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Sehingga Kabupaten Kotabaru potensial menjadi alternatif pintu gerbang transit yang sangat efisien bagi lalu lintas perdagangan internasional kawasan Asia Pasifik.

#### 5.2.3.1. Perkembangan Penduduk di Kabupaten Kotabaru

Jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari daya tarik Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam (batubara) yang besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sensus tahun 1980 jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru mencapai sebesar 193.650 jiwa. Kemudian pada sensus tahun 1990 jumlahnya meningkat menjadi 306.851 jiwa. Sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk selama periode 1980-1990 mencapai sebesar 4,71 % per tahun. Angka pertumbuhan penduduk tersebut jauh di atas rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia, yaitu masing-masing 2,32 % dan 1,98 % per tahunnya. Karena itu, jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru terus bertambah sejalan dengan masih tingginya angka pertumbuhan penduduknya.

Pada Sensus Penduduk tahun 2000, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotabaru mengalami peningkatan, sehingga jumlahnya mencapai 470.600 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 5,34 % per tahunnya. Angka pertumbuhan penduduk sebesar 5,34 % ini melebihi rata-rata angka pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya mencapai 2,33 %. Angka pertumbuhan tersebut melebihi angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang besarnya hanya mencapai 1,49 % per tahunnya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kotabaru, tidak terlepas dari daya tarik pertambangan batubara, dan juga disebabkan karena daerah ini merupakan salah satu daerah penerima Program Transmigrasi bagi Provinsi Kalimantan Selatan.

### 5.2.3.2. Perkembangan PDRB Kabupaten Kotabaru

Kondisi perekonomian Kabupaten Kotabaru, secara umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator ekonomi makro seperti misalnya angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada perekonomian suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto.

Perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 8 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.10. berikut ini:

Tabel 5.10.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotabaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 5.196.138,76	-
2012	Rp. 5.539.083.91	6,6
2013	Rp. 5.827.116.27	5,2
2014	Rp. 6.095.163.34	4,6
2015	Rp. 6.284.113,06	3,1

Sumber : BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Jika kita perhatikan secara seksama dari besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka Kabupaten Kotabaru dengan potensi ekonomi yang relatif cukup besar bagi Provinsi Kalimantan Selatan. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Kotabaru antara lain adalah sumber daya alam berupa batubara, biji besi dan minyak, di samping sumber daya kelautan berupa ikan laut dan sumber daya hayati lainnya. Bahkan meski 5 (lima) Kecamatan, yaitu Satui, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Sungai Loban, dan Batulicin yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru.

Sejak tanggal 23 Februari 2003 telah berdiri sendiri menjadi Kabupaten Tanah Bumbu, ternyata PDRB Kabupaten Kotabaru masih yang terbesar sumbangannya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011 nilai PDRB Kabupaten Kotabaru mencapai sebesar Rp. 5.196.138,76 Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 5.539.083,91. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 5.827.116,27 atau bertambah sebesar 5,20%. Pada

tahun 2014 meningkat menjadi Rp. 6.095.163,34 atau naik sebesar 4,60%, dan selanjutnya pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp. 6.284.113,06. (BPS : 2016).

### **5.2.3.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Kotabaru**

Struktur perekonomian suatu daerah dapat diukur dari peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Semakin besar nilai tambah (*value added*) yang tercipta pada suatu sektor ekonomi, akan membuat peranan sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator apakah daerah bersangkutan didominasi oleh sektor primer, sekunder atau tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam (SDA) dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian, serta sektor pertambangan dan galian.

Sedangkan sektor sekunder merupakan sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam (SDA), tetapi sudah mengandalkan kemajuan teknologi dan peran Sumber daya Manusia (SDM). Adapun yang termasuk sektor ini adalah sektor industri pengolahan/manufaktur, listrik & air, serta konstruksi. Selanjutnya sektor tersier adalah merupakan sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi. Sektor-sektor tersebut adalah sektor Perdagangan, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor Bank dan lembaga keuangan, serta sektor jasa-jasa.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2015 memperlihatkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru masih didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi dimaksud adalah sektor pertanian dengan kontribusi dalam perekonomian mencapai sebesar 19,16%. Selanjutnya sektor pertambangan & galian, dengan kontribusi sebesar 24,64%. Sementara itu kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai sebesar 9,84%. Berikutnya adalah sektor industri pengolahan pengangkutan dan komunikasi, dengan kontribusi mencapai sebesar 32,03%. Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Kotabaru selama rentang waktu 9 (sembilan) tahun, yaitu: tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.11 berikut ini:



Tabel. 5.11.  
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Kotabaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode Tahun 2011-2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	20,35	19,68	19,55	19,72	19,16
2.	Pertambangan & Galian	25,32	25,48	25,25	23,98	24,64
3.	Industri Pengolahan	32,37	32,53	32,13	32,15	32,03
4.	Listrik & Air bersih	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
5.	Bangunan	4,55	4,57	4,64	4,84	4,89
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	8,67	9,06	9,28	9,82	9,84
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,39	0,39	0,39	0,41	0,44
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	1,88	1,86	1,88	1,97	1,94
9.	Jasa-jasa	6,30	6,34	6,79	7,02	6,95
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Kotabaru

Berdasarkan Tabel 5.11 dapat dikatakan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kotabaru masih didominasi oleh sektor primer, yaitu suatu sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam (SDA) dalam proses produksi. Sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori ini adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan & galian, dengan persentase nilai tambah mencapai sebesar 56,67%. Secara khusus lagi Kabupaten Kotabaru merupakan daerah agraris. Hal ini disebabkan oleh peranan sektor pertanian yang masih dominan.

Pada tahun 2015 kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian Kabupaten Kotabaru mencapai sebesar 32,03%. Sektor lain yang cukup tinggi kontribusinya dalam perekonomian adalah sektor pertambangan & galian mencapai sebesar 24,64 %, dan sektor pertanian dengan kontribusinya dalam perekonomian mencapai sebesar 19,16 %.

#### 5.2.4. Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar berada pada posisi 2° 49' 55 - 3° 43' 38" Lintang Selatan dan di antara 114° 30' 20" -115° 35' 37" Bujur Timur, dengan luas wilayah mencapai ± 4.688 KM<sup>2</sup>. Kabupaten Banjar mempunyai batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Kota Martapura di samping sebagai kota kabupaten, dikenal pula sebagai kota "Serambi Mekkah"

Kalimantan Selatan. Di Kabupaten ini tersebar beberapa madrasah dan Pondok Pesantren. Salah satu Pesantren yang cukup dikenal adalah Darussalam. Kota Martapura, pada masa lalu merupakan pusat kerajaan Banjar, salah satu raja Banjar yang dikenal sebagai **penentang** penjajah Belanda adalah Pangeran Hidayatullah. Selain itu Kota Martapura merupakan tempat kelahiran ulama terkenal Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari.

#### **5.2.4.1. Struktur Ekonomi Kabupaten Banjar.**

Struktur perekonomian Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2015 masih bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian kabupaten Banjar mencapai sebesar 21,60%. Sedangkan sektor lainnya yang juga mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Banjar adalah sektor pertanian hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 17,60%. Kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa dengan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Banjar mencapai sebesar 15,04%.

Selanjutnya sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 9,53%. Sedangkan sektor-sektor lainnya, seperti sektor industri pengolahan, pengangkutan & komunikasi, serta keuangan, kontribusinya dalam perekonomian kabupaten Banjar masih di bawah 10%. Bahkan sektor listrik & air bersih, kontribusinya hanya mencapai sebesar 0,32%. Struktur perekonomian suatu daerah dapat diukur dari peranan/kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Struktur perekonomian menjadi salah satu indikator terhadap kemajuan daerah.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.12 berikut ini:

Tabel. 5.12.  
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Banjar Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	19,30	18,86	18,65	18,16	17,78
2.	Pertambangan & Galian	23,71	24,09	23,06	22,57	21,60
3.	Industri Pengolahan	6,72	6,68	6,66	6,63	6,57
4.	Listrik & Air bersih	0,29	0,28	0,29	0,29	0,32
5.	Bangunan	9,10	9,11	9,20	9,29	9,43
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,69	6,77	6,98	7,09	7,24
7.	Pengangkutan & Komunikasi	3,29	3,27	3,32	3,45	3,59
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	5,33	5,32	5,50	5,52	5,56
9.	Jasa-jasa	14,21	14,01	14,28	14,52	15,04
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kabupaten Banjar, 2016

Berdasarkan Tabel 5.12 di atas, terlihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011-2015 masih didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi, yaitu sektor pertambangan & galian, pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor bangunan. Secara umum sampai dengan tahun 2015, struktur perekonomian Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan belum menunjukkan perubahan yang cukup berarti, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sektor

-sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi paling besar dalam menciptakan nilai tambah (*vale added*) bagi perekonomian kabupaten Banjar ini adalah sektor pertambangan & galian mencapai sebesar 21,60%. Disusul kemudian oleh sektor pertanian dengan kontribusinya mencapai sebesar 17,78%. Berikutnya adalah sektor jasa-jasa kontribusi mencapai sebesar 15,04%, dan sektor bangunan 9,43% Sektor-sektor lainnya juga mempunyai peranan di dalam pembentukan nilai **tambah**, namun peranannya masih belum berarti atau rendah.

#### 5.2.4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah/daerah adalah dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung dari perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan, karena semata-mata hanya dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. Dalam hubungan ini pengaruh perubahan harga telah diabaikan.

Tabel 5.13  
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Banjar Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	6,86	4,30	5,41	7,52	9,39
2.	Pertambangan & Galian	26,44	3,05	(1,07)	2,76	(7,85)
3.	Industri Pengolahan	9,38	8,43	4,65	10,29	8,79
4.	Listrik & Air bersih	6,22	2,36	3,41	32,82	59,57
5.	Bangunan	7,04	4,36	11,15	13,15	11,91
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	13,19	12,15	10,50	14,70	11,46
7.	Pengangkutan & Komunikasi	10,85	7,00	13,68	11,36	8,77
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	19,20	10,52	15,60	8,59	9,06
	Jasa-jasa	6,93	3,23	4,02	16,62	13,12
Kabupaten Banjar		13,24	6,09	6,40	9,55	7,03

Sumber: BPS : Kabupaten Banjar, 2016

Untuk melihat fluktuasi yang terjadi pada perekonomian Kabupaten Banjar secara riil, maka perlu disajikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut harga konstan secara berkala dan berkelanjutan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar selama rentang waktu tahun 2007-2015, disajikan dalam Tabel 5.13. Sesuai dengan Tabel 5.13 di atas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar cukup baik. Selama kurun waktu 2011-2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar terus bergerak positif. Pada tahun 2007 pertumbuhannya mencapai sebesar 6,40%. Sementara pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 6,06%. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan Kabupaten Banjar mencapai 7,03%, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 6,12%. Secara sektoral, semua sektor ekonomi pertumbuhannya bergerak secara positif, meskipun terjadi kenaikan dan penurunan dalam laju pertumbuhannya. Sektor pertanian mengalami peningkatan dari 3,71% pada tahun 2011 menjadi 9,39% pada tahun 2015. Sedangkan sektor-sektor lainnya mengalami kenaikan.

#### 5.2.5. Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayahnya mencapai 2.700,82 KM<sup>2</sup>. Kabupaten Tapin secara administrasi terbagi dalam 12 (dua belas) Kecamatan, dengan 131 (seratus tiga puluh satu) kelurahan/desa. Berdasarkan letak geografisnya berada di jalur utama lalu lintas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, serta antar Provinsi khususnya menuju ke Provinsi Kalimantan Timur. Potensi ekonomi

yang penting di Kabupaten Tapin meliputi sektor pertambangan khususnya batubara, serta perkebunan karet dan kelapa sawit

#### 5.2.5.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Tapin.

Kondisi perekonomian Kabupaten Tapin, dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam periode waktu tertentu Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Perkembangan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Tapin selama rentang waktu 2011- 2015, disajikan dalam Tabel 5.14 berikut ini.

Tabel. 5.14.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode 2011 - 2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp. Juta)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 1.057.862.504	5,27
2012	Rp. 1.124.719.414	6,32
2013	Rp. 1.187.366.285	5,75
2014	Rp. 1.251.959.010	5,44
2015	Rp. 1.302.663.349	4,05

Sumber : BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Jika dilihat dari besaran nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Tapin telah mencapai sebesar Rp. 1.302.663.349 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,05%. Keadaan ini menurun jika dibanding dengan keadaan tahun 2011, di mana nilai PDRB hanya mencapai Rp. 1.057862.505, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,27%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tapin mempunyai kinerja yang kurang baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pergerakan dari laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Hal ini sangat berguna dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin di masa mendatang.

#### 5.2.5.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin.

Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Tapin selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.15.

Tabel. 5.15.  
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tapin Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	20,48	20,88	19,68	19,65	19,94
2.	Pertambangan & Galian	35,18	34,76	36,99	36,52	34,89
3.	Industri Pengolahan	8,02	7,78	6,44	6,33	6,31
4.	Listrik & Air bersih	0,36	0,35	0,35	0,34	0,37
5.	Bangunan	5,03	5,07	5,01	5,01	5,11
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	7,31	7,54	7,62	7,90	8,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	8,16	8,19	8,34	8,5	8,81
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	2,36	2,38	2,45	2,44	2,45
9.	Jasa-jasa	13,1	13,26	13,14	13,31	13,92
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kabupaten Tapin, 2016

Struktur ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungannya terhadap kemampuan memproduksi dari setiap sektor ekonomi. Dalam hubungan ini, struktur ekonomi terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi. Melihat kontribusi masing-masing sektor-sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), maka akan dapat diketahui peranan suatu sektor ekonomi dalam menunjang perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan Tabel 5.15 halaman 112 terlihat bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik Bruto) Kabupaten Tapin selama kurun waktu 2011-2015 masih didominasi oleh 4 (empat) sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan & galian, sektor jasa-jasa, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel. Sampai dengan tahun 2015, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Tapin mencapai sebesar 19,94%. Sedangkan sektor pertambangan & galian kontribusinya mencapai sebesar 34,89%. Kemudian sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 13,92%, serta sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 8,20%. Sementara kontribusi sektor lainnya masih di bawah 8%.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Tapin selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan pergeseran yang cukup berarti, dari perekonomian agraris menuju sektor industri dan jasa. Meskipun pada tahun 2015 sektor industri dan jasa menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya.

### 5.2.6. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara geografis terletak antara 02° 29' 58" - 02° 56' 10" Lintang Selatan, dan antara 114° 51' 19" - 115° 36' 19" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 1.804,94 KM<sup>2</sup>. Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi besar untuk pengembangan berbagai komoditas perkebunan, seperti kelapa dalam, kelapa sawit, karet, kakao/ cokelat, kulit manis, dsb. Sedangkan industri yang dikembangkan berupa industri pembuatan roda kapal, alat-alat pertanian, kerajinan imitasi yang terbuat dari tembaga dan perak, serta industri makanan.

#### 5.2.6.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan cerminan pencapaian kinerja perekonomian pada suatu periode waktu tertentu terhadap kinerja periode waktu sebelumnya. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting bagi perencanaan terutama dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan di masa mendatang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung pada potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) selama rentang waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.16 berikut ini.

Tabel 5.16  
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (dalam % )

No	Sektor Ekonomi	T a h u n				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	4,53	2,96	5,12	5,40	8,16
2.	Pertambangan & Galian	13,23	(2,25)	0,60	1,17	(8,22)
3.	Industri Pengolahan	6,44	3,63	2,88	6,92	8,52
4.	Listrik & Air bersih	(1,34)	(0,48)	(0,69)	16,87	32,12
5.	Bangunan	4,80	0,94	3,85	8,76	9,11
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,28	5,57	5,22	6,50	6,27
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,06	5,06	9,36	15,00	11,32
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	18,60	16,58	11,79	24,88	12,81
9.	Jasa-jasa	21,34	15,98	21,14	27,54	37,14
Hulu Sungai Selatan		5,77	3,27	4,38	5,88	5,90

Sumber: BPS : Kabupaten HSS, 2016

Berdasarkan Tabel 5.16, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan kinerja cukup baik. Sampai tahun 2015, pertumbuhan ekonomi

mencapai sebesar 5,90% per tahun. Angka ini meningkat dibanding tahun 2011, di mana angka pertumbuhan adalah sebesar 5,77% per tahun. Perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terus membaik ini, tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan yang terus membaik, sehingga sangat menunjang perkembangan perekonomian kabupaten/kota.

Dilihat secara sektoral, pertumbuhan sektor listrik dan air bersih pada tahun 2015 cukup tinggi, yakni mencapai sebesar 32,12%. Selanjutnya pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor jasa yaitu sebesar 37,14%. Sedangkan sektor Keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan pertumbuhannya hanya mencapai sebesar 12,81%,. Sementara sektor pertanian angka pertumbuhannya Sebesar 8,16%, dan sektor perdagangan, restoran dan hotel mencapai sebesar 6,27%.

#### 5.2.6.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Secara umum, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2015 mencapai 8,16%. Melihat kontribusi ini berarti meningkat dibanding kontribusi sektor pertanian tersebut tahun 2011 yang kontribusinya mencapai sebesar 4,53%. Meskipun demikian, selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama rentang waktu5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015 disajikan dalam Tabel 5.17:

Tabel. 5.17.

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	30,80	29,65	27,51	27,02	27,07
2.	Pertambangan & Galian	6,66	7,60	9,41	9,27	8,41
3.	Industri Pengolahan	8,65	8,46	8,05	7,96	8,03
4.	Listrik & Air bersih	0,43	0,41	0,39	0,40	0,43
5.	Bangunan	8,01	7,87	7,79	7,94	8,12
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	8,91	9,12	9,25	9,31	9,23
/.	Pengangkutan & Komunikasi	12,97	12,85	12,89	13,11	13,03
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	4,43	4,52	4,69	4,77	4,64
9.	Jasa-jasa	19,15	19,53	20,02	20,23	21,04
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.17 halaman 116 tersebut, dapat dikatakan bahwa



peranan/kontribusi sektor pertanian masih mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2011, sektor pertanian memberikan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai sebesar 30,80%, dan kemudian pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian tersebut mencapai sebesar 27,07%. Sedangkan. Sektor-sektor ekonomi lainnya yang telah memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sektor jasa dengan kontribusi sebesar 21,04% pada tahun 2015. Kemudian diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 13,03%, perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 9,23%, dan industri pengolahan sebesar 8,03%.

#### 5.2.7. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, secara geografis terletak antara  $2^{\circ} 27' - 2^{\circ} 46'$  Lintang Selatan dan antara  $115^{\circ} 5' - 115^{\circ} 31'$  Bujur Timur. Luas wilayah mencapai 1.472 KM<sup>2</sup>, yang terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai julukan “Parijs van Borneo “. Selain itu juga, kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu pusat industri kecil kosmetika tradisional, industri jamu, dan industri kopiah haji yang sudah di ekspor ke beberapa negara, di antaranya Brunei Darussalam, Malaysia, serta negara-negara timur tengah khususnya Arab Saudi dan Yaman. Salah satu komoditas unggulan sektor pertanian di kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah padi dan karet. Barabai sebagai ibukota kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan sebagai kota transit menuju kota-kota lain di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, memberikan harapan bagi pengembangan sektor jasa. Dengan dukungan berbagai sarana dan prasarana di antaranya jalan darat, air bersih, perbankan, serta telekomunikasi.

##### 5.2.7.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang dihitung berdasarkan perkembangan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan. Hal ini karena mengabaikan pengaruh perubahan harga, dan semata- mata dicerminkan oleh pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan pada periode waktu tertentu. Untuk melihat fluktuasi perekonomian secara riil, maka perlu disajikan PDRB harga konstan secara berkala.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.18. halaman 129 berikut ini:

Tabel. 5.18.

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 -2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	5,57	1,59	5	3,59	4,99
2.	Pertambangan & Galian	6,37	10,04	6,12	6,43	5,86
3.	Industri Pengolahan	4,70	4,91	4,56	4,46	2,04
4.	Listrik & Air bersih	11,72	11,85	8,74	25,06	37,74
5.	Bangunan	6,43	5,65	5,05	6,54	7,33
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	7,02	7,66	6,76	7,05	9,37
7.	Pengangkutan & Komunikasi	20,55	18,41	21,12	19,97	21,89
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	17,11	19,81	27,02	18,36	15,22
9.	Jasa-jasa	26,84	24,86	24,89	27,95	30,33
Hulu Sungai Tengah		5,98	4,85	5,83	5,56	6,12

Sumber : BPS Kabupaten HST, 2016

Secara umum berdasarkan Tabel 5.18 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2011-2015 terlihat mengalami perkembangan yang positif. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai sebesar 6,12 %. Angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2011 yaitu hanya sebesar 5,98 %. Dilihat secara sektoral, maka terlihat, bahwa sektor jasa-jasa mengalami peningkatan, meskipun peningkatannya sangat kecil yaitu hanya sebesar 3,49 %, sehingga sektor jasa-jasa pada tahun 2015 tumbuh sebesar 30,33 %. Sedangkan sektor-sektor lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang positif.

#### **5.2.7.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah**

Secara umum, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun waktu tahun 2011-2015 masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai sebesar 25,53%. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.19 berikut ini:

Tabel. 5.19.  
Perkembangan Ekonomi Sektor Kabupaten Hulu Sungai Tengah Menurut Harga Konstan  
Tahun 2010 Periode Tahun 2011 -2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	27,96	26,54	29,09	25,74	25,53
2.	Pertambangan & Galian	0,68	0,71	0,72	0,72	0,74
3.	Industri Pengolahan	15,98	15,70	15,48	15,52	15,07
4.	Listrik & Air bersih	0,59	0,58	0,56	0,58	0,50
5.	Bangunan	8,47	8,46	8,37	8,45	8,64
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	9,52	9,79	9,96	10,01	10,20
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,39	12,10	12,60	12,69	12,41
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	5,32	5,49	5,68	5,70	5,51
9.	Jasa-jasa	19,38	20,19	20,52	20,61	21,31
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2015

Berdasarkan Tabel 5.19, terlihat bahwa sektor-sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah, sektor jasa-jasa, dengan kontribusi mencapai 21,31%. Kemudian sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi mencapai sebesar 10,20%, dan kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 15,07%. Sedangkan sektor-sektor lainnya mempunyai kontribusi di bawah 10 %.

#### 5.2.8. Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan terletak di bagian utara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan berada pada titik koordinat 114° 50- 24” sampai 115° 50’ 24” Bujur Timur serta 2° 25’ 58” Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Balangan ± 1.878,30 KM Secara administratif wilayah Kabupaten Balangan terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan dan 152 desa. yaitu Kecamatan Paringin, Kecamatan Batu Mandi, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai, Kecamatan Awayan, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Paringin Selatan Potensi yang dimiliki Kabupaten Balangan ini antara lain adalah batubara dan biji besi, serta sektor perkebunan, khususnya karet.

##### 5.2.8.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan pencapaian kinerja perekonomian pada periode waktu tertentu terhadap kinerja periode waktu sebelumnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah sangat tergantung pada potensi- potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan Potensi tersebut baik berupa sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM), serta kebijakan-

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada dasarnya dirancang agar dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah bersangkutan.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Sektor-sektor ekonomi selama rentang waktu 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.20 halaman 122. Sesuai dengan Tabel 5.20 tersebut, Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan selama rentang waktu 5 (lima tahun) yaitu tahun 2011-2015 mengalami perkembangan yang negatif. Bahkan Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai sebesar 2,41%. Secara sektoral, sektor keuangan, persewaan & jasa-jasa mengalami **pertumbuhan** yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 25,44% dalam **tahun** 2015. Sedangkan sektor-sektor lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 5.20

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	4,99	2,68	3,44	4,85	4,69
2.	Pertambangan & Galian	10,30	7,63	9,34	6,13	0,99
3.	Industri Pengolahan	5,17	5,22	5,20	4,73	4,67
4.	Listrik & Air bersih	14,75	12,32	6,34	24,66	24,78
5.	Bangunan	6,06	6,17	6,01	6,05	5,72
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,48	5,81	6,13	4,34	5,89
7.	Pengangkutan & Komunikasi	14,96	14,88	18,68	20,00	18,42
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	36,44	22,65	28,93	24,26	25,44
9.	Jasa-jasa	17,16	16,83	16,95	20,84	20,49
Kabupaten Balangan		8,84	6,69	8,04	5,90	2,41

Sumber: BPS : Kabupaten Balangan, 2016

#### 5.2.8.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Balangan

Struktur perekonomian Kabupaten Balangan dalam kurun waktu tahun 2011- 2015 sangat didominasi oleh sektor pertambangan & galian. Besarnya kontribusi sektor pertambangan & galian untuk tahun 2015 mencapai 64,42%. Sedangkan sektor pertanian hanya sebesar 11,94%. Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat bahan tambang dan galian merupakan Sumber daya alam (SDA) yang tidak bisa diperbaharui. Bila sumber daya alam tersebut **dieksploitasi** secara besar-besaran, dan tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam dan ekosistem.

Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.21 berikut:

Tabel. 5.21.

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Balangan Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	10,77	10,83	10,54	10,78	11,94
2.	Pertambangan & Galian	70,74	69,82	69,87	68,78	64,42
3.	Industri Pengolahan	1,47	1,50	1,48	42,52	1,75
4.	Listrik & Air bersih	0,20	0,20	0,19	0,21	0,24
5.	Bangunan	3,16	3,33	3,30	3,50	4,07
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	3,78	3,94	4,04	4,12	4,75
7.	Pengangkutan & Komunikasi	2,68	2,75	2,76	2,90	3,22
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	0,94	1,01	1,03	1,08	1,20
9.	Jasa-jasa	6,26	6,62	6,79	7,11	8,39
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Balangan, 2016

Berdasarkan Tabel 5.21 di atas, terlihat bahwa sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Balangan, selain sektor pertambangan adalah, sektor pertanian, dengan kontribusi mencapai sebesar 11,94%, dan sektor jasa-jasa sebesar 8,39%. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya mempunyai kontribusi di bawah 5 %. Sehingga selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kabupaten Balangan **selalu** didominasi **sektor pertambangan dan galian**. Hal ini patut mendapat perhatian, mengingat sumber daya alam merupakan sumber daya yang tak dapat diperbaharui. Pemerintah kabupaten Balangan harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sektor-sektor yang selama ini masih menjadi unggulan daerah, seperti, karet alam dan pertanian tanaman pangan.

#### 5.2.9. Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Hulu Sungai Utara luas wilayahnya mencapai  $\pm 892,7$  Km<sup>2</sup> atau sekitar 2,38 dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini terletak pada koordinat 2 sampai 3° Lintang Selatan dan 115° sampai 116° Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi dalam 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Amuntai Tengah, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, dan Kecamatan Banjarang. Jumlah Desa/Kelurahan di sebanyak 219 buah. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi rawa lebak sebagai sentra pengembangan usaha pertanian, dan

pengembangan kerbau rawa, dan itik Alabio. Selain itu, kabupaten Hulu Sungai Utara juga memiliki sektor industri kecil (mebel kayu) sebagai salah satu sektor unggulan dalam perekonomian daerah. Keberadaan industri kecil mebel kayu tersebut cukup besar peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah ini.

#### 5.2.9.1. Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil Sensus Pendudukan Tahun 2010 adalah sebanyak 209.246 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 102.351 jiwa, wanita sebanyak 106.895 jiwa. Berdasarkan data tersebut, Penduduk wanita lebih banyak daripada penduduk laki-laki, yang berarti *ratio* mencapai 95,75 %. Rata-rata pertumbuhan selama tahun 2000 - 2010 adalah sebesar 0,61 % per tahun. Salah satu karakteristik penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara adalah kebiasaan mereka untuk “merantau” baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Hal ini terkait dengan pola pekerjaan mereka yang umumnya berdagang, dan petani. Jika dilihat dan sejarah, perpindahan penduduk asal kabupaten Hulu Sungai Utara ini sudah lama terjadi, yaitu sekitar akhir abad ke 19, terutama menuju daerah-daerah semenanjung Malaysia serta pantai timur Sumatera dan pulau Jawa. Perpindahan pada masa lalu lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan penjajah yang menerapkan pajak tinggi terhadap penduduk. Namun pola perpindahan pada masa sekarang sudah bergeser, tidak lagi menuju Malaysia atau pantai timur Sumatera. Perpindahan sekarang bergerak menuju ke daerah-daerah yang mempunyai aktivitas perekonomian yang ramai.

#### 5.2.9.2. Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha yang terdapat di wilayah tersebut. Struktur ekonomi menggambarkan besarnya kemampuan dan peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (*Value added*). Semakin besar nilai tambah yang dapat diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi tertentu akan menjadikan peranan/kontribusi sektor ekonomi tersebut Menjadi semakin penting. Di dalam struktur ekonomi tersebut akan tercermin pula komposisi peringkat nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor ekonomi.

Kontribusi sektor-sektor ekonomi tersebut akan dapat menjelaskan peranan dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah. Sehingga dengan memperhatikan peranan atau kontribusi sektor- sektor ekonomi akan dapat diketahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang paling dominan peranannya dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian daerah yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi pada kontribusi ekonomi secara sektoral inilah akan dapat diketahui bagaimana kinerja masing-masing sektor ekonomi dimaksud dalam membentuk struktur perekonomian daerah.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan menurut Sektor-sektor ekonomi selama rentang waktu tahun 2011-2015 disajikan dalam Tabel 5.22 :

Tabel. 5.22

Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	19,70	19,10	18,30	18,60	18,40
2.	Pertambangan & Galian	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20
3.	Industri Pengolahan	9,90	10,40	10,70	10,60	10,30
4.	Listrik & Air bersih	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5.	Bangunan	10,50	10,30	10,20	10,30	10,40
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	12,60	12,80	13,10	13,30	13,30
7.	Pengangkutan & Komunikasi	14,30	14,30	13,90	13,80	13,40
	Keuangan, Persewaan & Jasa	7,00	7,00	7,20	7,10	6,80
8.	Prsh					
9.	Jasa-jasa	25,1	25,20	25,80	25,50	26,50
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2016

Secara umum, perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara bercirikan agraris. Hal ini disebabkan karena dominasi dari sektor pertanian, khususnya dari sub sektor tanaman bahan makanan yang cukup besar. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini, rata-rata kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian dalam pembentukan pendapatan regional mencapai 18,16% per tahunnya. Besarnya kondisi sektor pertanian ini tidak terlepas dari kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai potensi lahan pertanian yang relatif luas berupa rawa lebak, dan telah digarap secara turun-temurun oleh masyarakat. Selain itu, dari lahan perairan yang dimiliki, baik berupa sungai maupun perairan rawa, diperoleh tambahan kontribusi yang berasal dari sub sektor perikanan. Sektor lainnya yang mempunyai kontribusi relatif besar pada tahun 2015 adalah sektor jasa-jasa sebesar 26,50%, perdagangan, restoran, dan perhotelan, yakni sebesar 13,13%. Kemudian dan sektor industri pengolahan sebesar 10,30%

Melalui perkembangan kontribusi yang diberikan oleh sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian kabupaten Hulu Sungai Utara. Terlihat bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara bergerak positif. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menentukan arah, sasaran, dan fokus perhatiannya terhadap sektor-

sektor yang mempunyai kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah.

#### 5.2.10. Kabupaten Tabalong

Kabupaten Tabalong dengan ibukotanya Tanjung, terletak di wilayah paling Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah mencapai  $\pm 3.946 \text{ KM}^2$  atau sekitar 10,61% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tabalong mempunyai 131 Desa/Kelurahan, yang terbagi dalam 12 (dua belas) kecamatan, yaitu: Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara, Kecamatan Upau, Kecamatan Haruai, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Murung Puduk, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Tanta, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Kelua, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong memiliki potensi sumber daya alam berupa batubara, serta perkebunan, terutama karet.

##### 5.2.10.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Tabalong

Peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran atau kemampuan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah (*value added*). Hal tersebut menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor perekonomiannya. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka akan dapat pula dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi pada daerah bersangkutan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan sebagai akibat timbulnya berbagai kegiatan atau aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah/regional tertentu. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) suatu daerah dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah bersangkutan, terlebih lagi setelah era otonomi daerah (OTDA) mulai diterapkan di daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Karena itu besaran angka/nilai PDRB yang mampu dihasilkan oleh suatu daerah sangat tergantung kepada faktor produksi yang telah dimiliki oleh daerah bersangkutan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai sarana/alat yang sering dipergunakan dalam proses perencanaan pembangunan serta dalam analisis ekonomi atau sosial. PDRB berguna sebagai bahan persiapan perencanaan dan analisis kebijakan ekonomi makro pada suatu daerah, seperti misalnya kebijakan pajak dan lain sebagainya. Sebagai bahan perencanaan dan alat analisis pembangunan, dapat dilihat dampaknya bagi perekonomian, di samping sebagai bahan pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan seperti mengukur laju pertumbuhan



ekonomi dan melihat laju inflasi atau deflasi. Sebaliknya jika dinyatakan dalam per kapita, PDRB dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat pada suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu.

Perkembangan besaran nilai PDRB (Produk Domestik Bruto) Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu tahun 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.23.

Tabel 5.23 .

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabalong Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	Rp. 3.188.857,87	-
2012	Rp. 3.355.635,13	5,23
2013	Rp. 3.501.940,82	4,36
2014	Rp. 3.643.069,03	4,03
2015	Rp. 3.730.866,99	2,41

Sumber : BPS : Tabalong Dalam Angka, 2016

Sesuai dengan Tabel 5.23 halaman 128 terlihat bahwa selama periode tahun 2011-2015, nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), mengalami penurunan. Pada tahun 2011 nilai PDRB Kabupaten Tabalong mencapai Rp. 3.188.857,87 dengan pertumbuhan sebesar 5,60%. Hal ini dikarenakan melemahnya ekspor dari hasil pertambangan dan galian yang merupakan unggulan di Kabupaten Tabalong.

#### 5.2.10.2. Struktur Perekonomian Kabupaten Tabalong

Struktur perekonomian Kabupaten Tabalong selama kurun waktu tahun 2011- 2015 sangat didominasi oleh sektor pertambangan & galian. Besarnya kontribusi sektor pertambangan & galian pada tahun 2011 mencapai 69,11%. Sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 12,38%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat sebagian besar hasil pertambangan tersebut di ekspor ke luar negeri yang sangat rentan terhadap perkembangan ekonomi global. Bahan tambang dan galian merupakan sumber daya alam (SDA) yang tidak bisa diperbaharui. Eksploitasi secara besar-besaran terhadap SDA, bila tidak dilakukan dengan baik dan benar, berdampak Pada kerusakan lingkungan.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Tabalong selama rentang waktu 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.24 berikut.

Tabel. 5.24  
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kabupaten Tabalong Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode Tahun 2011-2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	9,92	10,02	9,96	10,40	10,86
2.	Pertambangan & Galian	61,61	60,05	59,01	56,90	51,48
3.	Industri Pengolahan	6,15	6,48	6,45	6,61	7,86
4.	Listrik & Air bersih	0,23	0,23	0,23	0,25	0,29
5.	Bangunan	3,71	3,85	3,98	4,20	4,98
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,19	6,70	6,98	7,42	8,42
7.	Pengangkutan & Komunikasi	3,78	3,89	3,98	4,31	4,78
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Prsh	5,14	5,39	5,91	6,09	6,99
9.	Jasa-jasa	3,27	3,39	3,51	3,81	4,35
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Tabalong, 2016

Berdasarkan Tabel 5.24 tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2015, sektor-sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Tabalong adalah, sektor pertambangan & galian dengan kontribusi mencapai sebesar 51,48 %, Sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 10,86% pada tahun 2015. Kemudian sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan sebesar 6,99%, selanjutnya sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi 8,42 sedangkan sektor jasa-jasa, dengan kontribusi sebesar 4,35%.

#### 5.2.11. Kota Banjarbaru

Kota Banjarbaru berada pada titik koordinat 03° 27 ' 03° 29' Lintang Selatan dan 114° 45' - 114° 45' Bujur Timur, pada posisi geografis ±35 KM<sup>2</sup> pada arah 296° 30' tenggara Kota Banjarmasin. Kota Banjarbaru terletak pada perlintasan utama trans Kalimantan yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kota-kota di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Secara administratif, Kota Banjarbaru yang mempunyai luas wilayah ± 371,30 KM<sup>2</sup> terbagi atas 12 Kelurahan dengan 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Landasan Ulin, kecamatan Cempaka, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1999, dan menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang sebelumnya berstatus sebagai "Kota Administratif " dan sempat berpredikat sebagai salah satu kota administratif tertua di Indonesia.

#### 5.2.11.1 Perkembangan Penduduk Kota Banjarbaru.

Wilayah Kota Banjarbaru yang sekarang ini, dulunya merupakan perbukitan di pinggiran Kota Martapura yang dikenal sebagai Gunung Apam. Kota Banjarbaru pada masa lalu dikenal sebagai tempat peristirahatan para buruh penambang intan selepas menambang di daerah Cempaka. Pada era tahun 1950-an Gubernur Kalimantan waktu itu Dr.Murjani, dibantu oleh seorang arsitek berkebangsaan Belanda bernama Van Der Pijl merancang kota Banjarbaru sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dalam perjalanannya, perencanaan dan pembangunan Kota Banjarbaru sempat terhenti sampai terjadinya perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif, yang berada dalam lingkungan wilayah Kabupaten Banjar.

Kota Banjarbaru semakin hari semakin berkembang, dan jumlah Penduduknya pun terus bertambah seiring dengan semakin terbukanya wilayah Kota Banjarbaru, baik untuk lokasi kawasan industri maupun untuk dijadikan daerah Pemukiman penduduk. Jumlah **penduduk** Kota Banjarbaru berdasarkan data Sensus penduduk tahun 2010 tercatat sebanyak 199.627 jiwa, dengan rata-rata angka pertumbuhan mencapai sebesar 4,84 % per tahunnya. Tingginya angka pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru tersebut, tidak terlepas daripada daya tarik karena kedudukan Kota Banjarbaru sekarang yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, selain sebagai kota pendidikan, serta tempat pemukiman.

#### 5.2.11.2. Perkembangan Perekonomian Kota Banjarbaru

Secara umum perekonomian Kota Banjarbaru jika dilihat dari nilai PDRB menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini seiring dengan peningkatan pembangunan fisik , baik perumahan/*real estate*, bangunan usaha berupa Mal, pertokoan/pusat pembelanjaan, Hotel-hotel, rumah makan, dsb. Sejak tahun 2009 secara bertahap dilakukan perpindahan kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan bersamaan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru.

Perkembangan nilai PDRB Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 2011-2015, disajikan dalam Tabel 5.25 berikut ini :

Tabel 5.25.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banjarbaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 - 2015

Tahun	Nilai PDRB (Dalam juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	RD. 1.007.498,74	-
2012	RP. 1.073.389,15	6,54
2013	RP. 1.143.588,80	6,59
2014	RP. 1.219.980,53	6,68
2015	RP. 1.304.281,18	6,91

Sumber : BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2016

Berdasarkan Tabel 5.25 halaman 132 terlihat bahwa selama kurun waktu tahun 2011-2015, nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Kota Banjarbaru mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kota Banjarbaru mencapai Rp. 1.304.281,18, dengan pertumbuhan sebesar 6,91%. Nilai PDRB yang dapat dicapai selama tahun 2015 tersebut, lebih tinggi dibanding pencapaian tahun 2011, dengan nilai sebesar Rp. 1.007.498,74 juta. Berdasarkan gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru mempunyai kinerja yang cukup baik dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir.

#### 5.2.11.3. Struktur Perekonomian Kota Banjarbaru

Struktur perekonomian Kota Banjarbaru selama rentang waktu antara tahun 2011 hingga tahun 2015 didominasi oleh 4 (empat) sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi tersebut meliputi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, dan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2015, sektor perdagangan, restoran dan hotel telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kota Banjarbaru sebesar 32,35%., kemudian sektor keuangan, Persewaan & Komunikasi sebesar 17,66% disusul oleh sektor bangunan sebesar 14,72% serta sektor jasa-jasa dengan kontribusi mencapai 13,26%.

Selanjutnya sektor yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai sebesar 7,82%. Meskipun Kota **Banjarbaru tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang besar seperti batubara, biji besi** dsb. Namun wilayah Kota Banjarbaru mempunyai areal penambangan intan dan galian C yaitu berupa pasir dan batu-batuan., seperti yang terdapat di wilayah kecamatan Cempaka, Karang Intan, dan Landasan Ulin. Kegiatan penambangan intan dan bahan tambang galian C yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Kota Banjarbaru. Pada tahun 2015 kontribusi sektor pertambangan & galian ini dalam perekonomian Kota Banjarbaru telah mencapai sebesar 4,06%.

Perkembangan struktur perekonomian Kota Banjarbaru mulai tahun 2011-

2015 disajikan dalam Tabel 5.26 berikut ini.

Tabel. 5.26

Perkembangan Ekonomi Sektor Kota Banjarbaru Menurut Harga Konstan Tahun 2010  
Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,49	2,36	2,28	2,22	2,13
2.	Pertambangan & Galian	4,45	4,49	4,25	4,13	4,06
3.	Industri Pengolahan	9,04	8,73	8,24	7,98	7,82
4.	Listrik & Air bersih	0,84	0,75	0,71	0,74	0,78
5.	Bangunan	14,82	14,54	14,24	14,51	14,72
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	29,14	30,15	32,03	32,20	32,35
7.	Pengangkutan & Komunikasi	8,19	7,89	7,42	7,53	7,23
8.	Kuangan, Persewaan & Jasa Prsh	17,25	17,44	17,57	17,46	17,66
9.	Jasa-jasa	13,78	13,64	13,25	13,23	13,26
Total		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS : Kota Banjarbaru, 2016

Sesuai dengan Tabel 5.26 tersebut di atas, menunjukkan bahwa perekonomian Kota Banjarbaru berkembang cukup baik. Semua sektor ekonomi berkembang secara Positif Namun demikian tidak terjadi pergeseran dalam struktur perekonomian. Selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor perekonomian Kota Banjarbaru selalu didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, dan industri pengolahan. Sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih di bawah 10%.

#### 5.2.12. Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala dengan ibukotanya Marabahan. Secara administratif Kabupaten Barito Kuala terbagi dalam 17 (tujuh belas) Kecamatan, yakni Kecamatan Marabahan, Kecamatan Tabukan. Kecamatan Kuripan, Kecamatan Bakumpai. Kecamatan Cerbon, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Barambai, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Jejangkit, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Alalak, Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Mekar Sari, Kecamatan Tamban, dan Kecamatan Tabunganen. Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. Sebelumnya Kabupaten ini berstatus Kawedanaan di bawah Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala berjarak 47 km dari Kota Banjarmasin adalah 47 km. Kondisi lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala ini sebagian besar merupakan lahan gambut. Hal ini cukup mempengaruhi kondisi infrastruktur khususnya akses jalan. Karena itu sebagian besar transportasi yang dilakukan oleh

penduduk, masih menggunakan perahu, kelotok dan *speedboat*. Hal ini menyebabkan konsentrasi pengembangan wilayah menjadi berbeda. Untuk pengembangan wilayah kabupaten bagian selatan sungai Barito, maka interaksi sosial ekonominya diarahkan untuk mengikut. perkembangan Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan mengingat wilayah ini lebih dekat dengan kota Banjarmasin. Di wilayah bagian selatan Kabupaten Barito Kuala ini secara geografis berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin, seperti Kecamatan Tamban, Anjir Muara, Alalak, Berangas. Daerah bagian selatan kabupaten Barito Kuala ini, bahkan menjadi alternatif pemukiman warga Banjarmasin.

Pengembangan wilayah pembangunan, Kabupaten Barito Kuala terbagi atas 3 (tiga) Sub Wilayah Pembangunan yaitu: Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusatnya Marabahan, meliputi beberapa Kecamatan, yaitu Kecamatan Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Barambai, Tabukan, Kuripan, Belawang, dan Wanaraya (merupakan Kecamatan pemekaran kecamatan Belawang). Sedangkan Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya kecamatan Berangas, meliputi Kecamatan Alalak, Rantau Badauh, dan Mandastana. Selanjutnya Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusatnya adalah kecamatan Tamban, meliputi kecamatan Tamban, Anjir Pasar, Anjir Muara, Mekarsari, dan Tabunganen.

#### **5.2.12.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala**

**Secara umum perekonomian Kabupaten Barito Kuala** menunjukkan peningkatan yang cukup berarti **Hal ini terjadi** seiring dengan **terjadinya peningkatan** pembangunan fisik, baik perumahan, bangunan usaha, Hotel/penginapan, rumah makan, serta bangunan perkantoran. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala selama rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2015, disajikan dalam Tabel 5.27 halaman 137.

Sesuai dengan Tabel 5.27 halaman 137, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2015 telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 5,26%, Jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan secara sektoral. Maka sektor ekonomi yang mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi adalah, sektor listrik & air bersih mencapai sebesar 30,65%, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa 26,75%, sektor jasa-jasa mencapai 24,25%, sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 20,96%.

Sektor ekonomi lainnya yang mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala adalah sektor perdagangan, restoran & Hotel sebesar 7,82%, dan yang terendah adalah sektor industri pengolahan sebesar 3,62% dan sektor pertanian yang menurun hingga mencapai 2,15% dikarenakan pesatnya

daerah Barito Kuala menjadi penopang pembangunan perumahan untuk warga Banjarmasin terutama di daerah Handil bakti, sektor industri pengolahan mengalami penurunan, hal ini terkait dengan kondisi industri perkayuan yang sedang mengalami kesulitan bahan baku. Akibatnya beberapa industri perkayuan terpaksa menghentikan sebagian kegiatan produksinya, bahkan menutup perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kayu (*Plywood*).

Tabel 5.27.

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Barito Kuala Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,80	3,46	(0,93)	0,84	2,15
2.	Pertambangan & Galian	4,92	6,19	7,16	7,23	6,73
3.	Industri Pengolahan	2,13	3,34	4,53	2,19	3,62
4.	Listrik & Air bersih	11,32	14,06	13,96	30,00	30,65
5.	Bangunan	6,79	7,32	5,91	6,67	6,70
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	5,47	6,94	8,85	8,71	7,82
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,78	14,54	16,44	22,49	20,96
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	25,54	23,48	33,64	27,31	26,75
9.	Jasa-jasa	13,91	19,28	22,84	25,44	24,25
Barito Kuala		4,24	4,88	4,12	4,51	5,26

Sumber: BPS : Kabupaten Barito Kuala, 2016

#### 5.2.12.2. Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Kuala

Struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala selama kurun waktu lima tahun, yakni dari tahun 2011 hingga tahun 2015 didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor bangunan. Sampai tahun 2015, kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala mencapai 28,41%, Sektor ekonomi lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai sebesar 17,61%. Sementara itu sektor perdagangan, restoran dan hotel memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Barito Kuala sebesar 11,34%, **serta sektor** bangunan sebesar 13,20%.

Perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala selama rentang lima tahun, yaitu, tahun 2011 hingga tahun 2015, disajikan dalam Tabel 5.28 berikut **ini**:

**Tabel. 5.28**

**Perkembangan Ekonomi Sektor** Kabupaten Barito Kuala Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	32,29	31,41	29,80	28,66	28,41
2.	Pertambangan & Galian	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
3.	Industri Pengolahan	18,59	18,46	18,44	18,16	17,61
4.	Listrik & Air bersih	0,30	0,30	0,30	0,32	0,33
5.	Bangunan	12,32	12,42	12,57	12,98	13,20
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	10,03	10,38	10,77	11,17	11,34
7.	Pengangkutan & Komunikasi	7,81	7,81	7,83	8,04	7,91
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	12,07	12,50	13,29	13,48	13,74
9.	Jasa-jasa	6,49	6,65	6,91	7,11	7,33
Barito Kuala		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Barito Kuala, 2016

Sesuai dengan Tabel 5.28 tersebut di atas, terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2015 belum menunjukkan pergeseran yang cukup berarti. Perekonomian Kabupaten Barito Kuala selama periode tersebut masih bertumpu kepada 4 (empat) sektor perekonomian. Sektor-sektor ekonomi tersebut adalah, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, restoran dan hotel, serta sektor bangunan Pada tahun 2015, sektor pertanian telah memberikan kontribusi kepada perekonomian Kabupaten Barito Kuala mencapai sebesar 28,41%. Selanjutnya sektor yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 17,61%, disusul oleh sektor keuangan, persewaan & komunikasi sebesar 13,74%, selanjutnya sektor bangunan sebesar 13,20%, sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi sebesar 11,34%,. Sedangkan sumbangan sektor-sektor lainnya masih di bawah 10%.

#### 5.2.13. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin terletak antara 3°16'4" - 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" - 114°39'55" Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai, yang sebagian dari anak sungai tersebut dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sarana transportasi di samping transportasi darat yang sudah ada. Kota Banjarmasin berada dekat dengan muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura.

Kota Banjarmasin yang luasnya hanya ± 72.000 KM<sup>2</sup> atau sekitar 0,19%



dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 50 (lima puluh) wilayah kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Timur, dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dengan 12 Kelurahan, dan Kecamatan Banjarmasin Utara, dengan 9 Kecamatan.

#### **5.2.13.1. Perkembangan Penduduk Kota Banjarmasin.**

Penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan subyek maupun obyek yang menjadi sasaran dari pembangunan itu sendiri. Penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan sensus penduduk tahun 1980 berjumlah 381.286 jiwa. Pada sensus penduduk tahun 1990 jumlahnya meningkat menjadi 480.737 jiwa. Selama kurun waktu sepuluh tahun, yaitu periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin rata-rata sebesar 2,34% per tahun. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibanding angka pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 2,32% per tahun, dan angka pertumbuhan nasional sebesar 1,98% selama periode 1980-1990 (BPS : Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2011)

Peningkatan penduduk terus terjadi, di mana pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Banjarmasin bertambah menjadi 585.100 jiwa. Kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi 625.481 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,69% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Selama ini Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi, pusat bisnis dan perdagangan selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Perkembangan yang pesat di sektor pertambangan batubara sejak tahun 2000-an rupanya menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang, sehingga Kota Banjarmasin tidak lagi menarik untuk didatangi.

#### **5.2.13.2. Perkembangan Ekonomi Kota Banjarmasin.**

Nilai PDRB Kota Banjarmasin selama rentang waktu lima tahun terakhir, yakni pada periode tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 PDRB Kota Banjarmasin atas dasar harga berlaku mencapai sebesar Rp.6.703.540,- dan atas dasar harga konstan mencapai sebesar Rp. 4.080.298. Pada tahun 2011 PDRB meningkat menjadi Rp. 10.534.540 (berdasarkan Harga Berlaku), dan atas dasar Harga Konstan nilainya mencapai sebesar Rp. 5.112.940,.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu Kota yang di wilayahnya tidak mempunyai sumber kekayaan alam (SDA) misalnya Batubara, biji besi, dan lain sebagainya, sebagaimana yang dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan Namun Kota Banjarmasin mempunyai sumber daya

manusia (SDM) yang cukup baik. sehingga berpotensi untuk dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Banjarmasin Kegiatan/aktivitas perekonomian masyarakat sebagian besar bergerak di sektor-sektor perdagangan. industri pengolahan. restoran dan hotel, pengangkutan dan telekomunikasi, lembaga keuangan, serta jasa-jasa.

Perkembangan PDRB Kota Banjarmasin selama rentang waktu 2011-2015 di sajikan dalam Tabel 5.29 berikut ini :

Tabel 5 29

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Banjarmasin Menurut Harga Konstan Tahun 2010 Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	-0,89	3,70	5,49	-0,38	3,35
2.	Pertambangan & Galian	-	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	1,76	3,27	3,36	2,07	2,94
4.	Listrik & Air bersih	10,71	13,85	7,46	32,61	32,87
5.	Bangunan	6,38	6,61	3,82	6,57	6,23
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	6,75	7,08	7,54	8,01	6,54
7.	Pengangkutan & Komunikasi	19,24	20,86	24,48	23,25	20,39
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	27,65	28,83	34,00	24,98	26,25
9.	Jasa-jasa	15,2	15,06	20,86	24,24	20,43
Barito Kuala		5,15	6,18	6,93	6,11	5,79

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2016

Berdasarkan Tabel 5.29 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin, memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat. Sektor yang paling dominan pada tahun 2015 adalah sektor listrik & air bersih sebesar 32,87% disusul oleh sektor keuangan, persewaan & jasa berkontribusi sebesar 26,25% selanjutnya sektor jasa-jasa sebesar 20,43% hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kota Banjarmasin didominasi oleh jasa-jasa sedangkan pertambangan & galian tidak ada di kota Banjarmasin.

### 5.2.13.3. Struktur Perekonomian Kota Banjarmasin

Struktur perekonomian Kota Banjarmasin seperti yang terlihat dalam Tabel 5.30 halaman 143, di mana sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya terhadap perekonomian Kota Banjarmasin pada tahun 2015, yaitu sebesar 19,47%. Sektor lain yang cukup besar kontribusinya adalah sektor keuangan, persewaan & jasa dengan kontribusi sebesar 19,08%. Kemudian sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,45%.

Tabel 5.30.  
Perkembangan Ekonomi Sektoral Kota Banjarmasin Menurut Harga Konstan Tahun  
2010 Periode Tahun 2011 – 2015 (dalam %)

No	Sektor Ekonomi	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian	2,82	2,70	2,64	2,51	2,50
2.	Pertambangan & Galian	0	0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	21,31	20,51	19,72	18,91	18,45
4.	Listrik & Air bersih	1,42	1,34	1,18	1,35	1,41
5.	Bangunan	9,88	9,84	9,42	9,57	9,80
6.	Perdagangan, restoran & Hotel	11,71	12,04	12,09	12,18	12,36
7.	Pengangkutan & Komunikasi	19,34	19,36	19,33	19,63	19,47
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	17,51	18,31	19,40	19,40	19,08
9.	Jasa-jasa	16,03	16,08	16,17	16,46	16,94
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS : Kabupaten Kota Banjarmasin, 2016

Sementara sektor jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 16,94%. Jika diamati dengan seksama, maka selama 5 (lima) tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Banjarmasin hampir tidak mengalami pergeseran. Struktur perekonomian Kota Banjarmasin selama periode 2011-2015 didominasi oleh 4 (empat) sektor sebagaimana tersebut di atas. Selain itu terlihat pula bahwa, sumbangan sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sehingga pada tahun 2015 kontribusinya hanya mencapai 2,50%. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kota Banjarmasin luas wilayahnya hanya sekitar 72 KM persegi. Sebagai pusat kegiatan bisnis, pembangunan pusat pembelanjaan, Pertokoan, hotel berkembang pesat, restoran/rumah-rumah makan memerlukan lahan yang besar.

Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya selama 5 (lima) tahun terakhir **juga** cenderung mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni periode tahun 2011-2015 menunjukkan keadaan yang cukup baik. Berarti kebijakan-kebijakan yang telah di programkan dalam perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik.

### 5.3. Deskripsi Variabel Penelitian

#### 5.3.1. Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah dalam penelitian ini adalah belanja modal berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun dalam penggunaannya oleh pemerintah. Belanja modal dapat berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, jaringan dan aset lainnya dalam satuan rupiah. Aset tetap tidak berwujud yang dianggarkan dalam bentuk anggaran belanja modal sebesar harga beli aset ditambah seluruh belanja yang terkait dalam pengadaan sampai aset tersebut digunakan.

Tabel 5.31

Investasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015  
(Jutaan/Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Tanah Laut	324.300	349.058	360.085	370.722	390.810	358.995
Kotabaru	318.816	339.023	350.620	365.622	375.211	349.858
Banjar	152.070	232.702	242.711	251.614	263.710	228.561
Barito Kuala	273.034	287.390	295.710	301.213	305.620	292.593
Tapin	175.159	245.400	255.200	268.730	280.721	245.042
Hulu Sungai Selatan	292.936	313.597	339.329	345.298	355.600	329.352
Hulu Sungai Tengah	286.625	307.115	320.831	328.710	335.830	315.822
Hulu Sungai Utara	129.257	160.866	175.722	183.980	190.820	168.129
Tabalong	327.626	353.169	360.730	365.710	372.650	355.977
Tanah Bumbu	249.611	269.339	275.821	280.645	286.730	272.429
Balangan	524.808	611.427	620.713	645.820	652.720	611.098
Banjarmasin	883.219	966.998	985.820	1.005.100	1.025.210	973.269
Banjarbaru	479.178	352.413	360.271	365.820	367.812	385.099
Rata-Rata	339.741	368.346	380.274	390.691	400.265	375.863

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

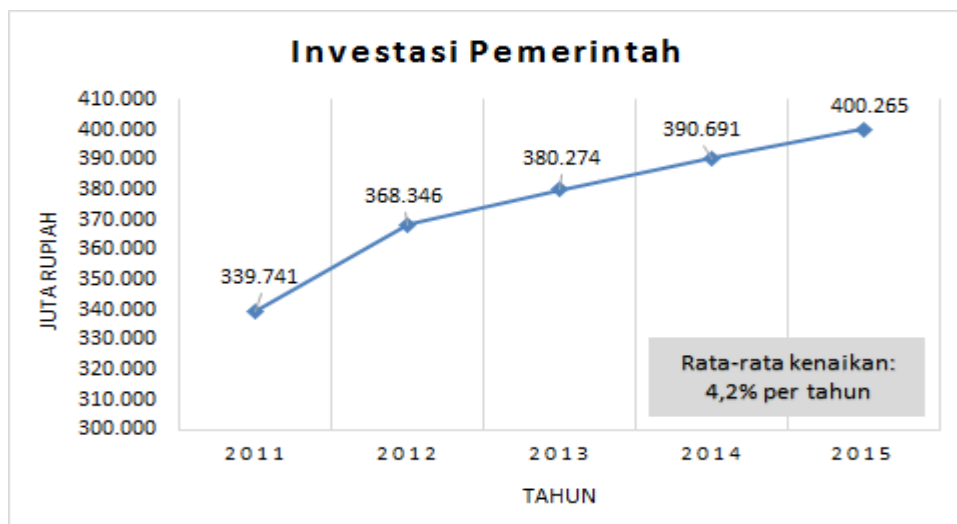
Investasi pemerintah dianggap sebagai investasi publik/investasi negara adalah investasi yang dilakukan oleh negara atau sumber daya investasi tersebut berasal dari milik atau kekayaan negara (*public asset*) untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan publik. (Noor Herny Faisal,

**2013 : 40).** Investasi seperti ini bersifat nirlaba yang dilakukan pemerintah sehingga anggarannya melalui APBN dan APBD sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang APBD yang menyatakan bahwa belanja modal sebagai salah satu sumber belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pemerintah daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dinikmati masyarakat dalam bentuk pelayanan umum. Pelayanan umum dalam pembangunan infrastruktur yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah berupa belanja modal dalam APBD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 menunjukkan kemampuan masing-masing daerah dalam mengalokasikan belanja modalnya bagi pembangunan daerah. Semua daerah sudah mengalokasikan belanja modalnya di atas Rp 150 miliar, yang paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Rp 168,129 miliar. Kontras dengan daerah hasil pemekaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Kabupaten Balangan yang belanja modalnya mencapai Rp 611,098 miliar. Keadaan ini menjadi sebuah kajian dan perhatian karena kabupaten induk setelah pemekaran mengalami penurunan APBD dan belanja modalnya apalagi pada tahun 2013 sudah berakhir kontrak bagi hasil 50 % dari royalti pertambangan batubara di Kabupaten Balangan tidak lagi disetor ke Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga semakin memperlemah kemampuan keuangan daerah.

Pengeluaran pemerintah yang paling besar adalah belanja modal rata-rata tahun 2011-2015 pada APBD Kota Banjarmasin yang mencapai Rp 973,269 miliar disusul Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu. Besarnya rata-rata belanja modal pada daerah ini karena daerah ini sangat banyak membangun infrastruktur, Kota Banjarmasin melakukan pembenahan kota, kemudian Kabupaten Balangan alokasi belanja modal untuk membangun daerah kabupaten yang baru pemekaran sedangkan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah yang paling luas sehingga perlu anggaran besar dalam belanja modal untuk membangun daerah.

Kecenderungan (*trend*) nilai investasi pemerintah berdasarkan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut:



Gambar 5.1.

Trend Investasi Pemerintah Tahun 2011-2015

Gambar 5.1 menunjukkan rata-rata nilai investasi pemerintah berdasarkan belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung naik, dengan rata-rata kenaikan di setiap tahunnya mencapai 4,2%.

### 5.3.2. Investasi Swasta

Investasi swasta ini dianggap sebagai investasi menurut Sukimo (2008:121) yaitu pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi swasta menurut Noor Henry Faizal (2013:41) adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya pengusaha dengan tujuan mendapatkan manfaat berupa laba yang dilakukan usaha mikro/rumah tangga, usaha kecil dan manfaat berupa laba yang dilakukan usaha mikro/rumah tangga, usaha kecil dan menengah, dan usaha besar yang terdiri dari PMDN dan PMA termasuk BUMN dan BUMD.

Secara konsep investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (*resources*) saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat di kemudian hari (masa yang akan datang) yang dikonversi ke dalam satuan moneter yaitu uang. Investasi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi perkembangan output dan pertumbuhan ekonomi. Investasi otomatis merupakan fungsi pendapatan nasional / produk domestik bruto yang berarti investasi otonom akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Noor Henry Faizal, 2013 :34)

Tabel 5.32  
Investasi Swasta Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015  
(Jutaan/Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Tanah Laut	411.716	428.162	396.009	424.800	458.582	423.854
Kotabaru	6.367.368	6.571.176	2.810.823	231.753	5.347.534	4.265.731
Banjar	685.047	873.238	993.482	545.987	591.376	737.826
Barito Kuala	615.636	626.486	10.000	2.975.983	191.422	883.905
Tapin	55.200	12.500	97.572	309.480	193.825	133.715
Hulu Sungai Selatan	23.667	24.851	170.954	185.071	200.359	120.980
Hulu Sungai Tengah	180.548	189.575	8.263.380	9.603.041	8.896.462	5.426.601
Hulu Sungai Utara	15.073	15.827	155.735	167.480	180.406	106.904
Tabalong	822.250	691.862	1.506.240	7.456.321	7.456.321	3.586.599
Tanah Bumbu	904.278	320.000	863.575	537.907	584.555	642.063
Balangan	398.936	346.593	123.851	429.420	142.380	288.236
Banjarmasin	2.068.047	1.463.020	869.434	6.167.793	192.464	2.152.152
Banjarbaru	104.763	111.374	369.273	396.932	435.001	283.469
Rata-Rata	973.271	898.051	1.279.256	2.263.998	1.913.130	1.465.541

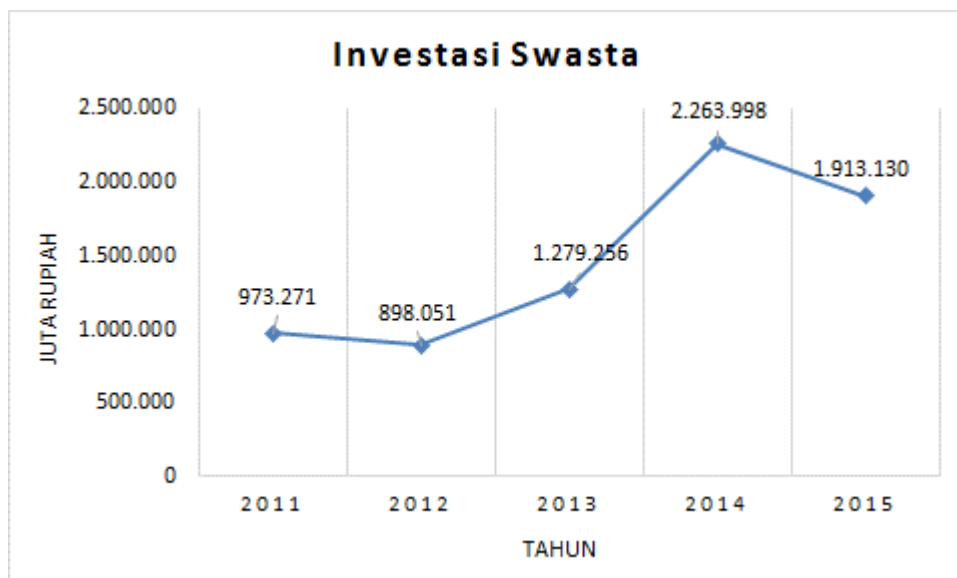
Sumber : BPS dan BKMPD Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Perkembangan investasi swasta per kabupaten/kota dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki rata-rata penanaman modal swasta yang paling tinggi yaitu Rp 5.426.601,00 juta, investasi terbesar pada tahun 2011 sebesar Rp 9.603.041,00 juta hal ini menunjukkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai daerah tujuan investasi. Diikuti Kabupaten Kotabaru dengan rata-rata Rp. 4.265.731,00 juta dikarenakan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah potensial dan memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti sektor pertambangan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan sektor industri sehingga banyak investor yang tertarik dan kemudian menanamkan modalnya di daerah ini.

Daerah yang memiliki rata-rata investasi per tahun paling kecil adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar Rp 106.904,00 juta, daerah ini baru terjadi peningkatan investasi swasta pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 180.406,00 juta dengan masuknya perusahaan swasta.

Kontribusi investasi swasta terhadap perekonomian daerah sangat besar dan jika memperhatikan besarnya investasi swasta secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Selatan yang besarnya mencapai Rp. 24,870 triliun pada tahun 2015 maka sangat tepat menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang menjanjikan.

Kecenderungan (*trend*) nilai investasi swasta berdasarkan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut:



Gambar 5.2.

Trend Investasi Swasta Tahun 2011-2015

Gambar 5.2 menunjukkan rata-rata nilai investasi swasta pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung berfluktuasi. Selama tahun 2011-2014, rata-rata investasi swasta cenderung meningkat, sedangkan pada tahun 2015 ada penurunan. Kenaikan terbesar investasi swasta terjadi di tahun 2014, yaitu ada kenaikan 77% dibandingkan tahun sebelumnya, selanjutnya ada penurunan 15,5% investasi swasta di tahun 2015.

### 5.3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznet dalam Todaro (2000:136), posisi pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang dewasa ini dalam berbagai aspeknya sangat berlainan dengan pengalaman negara-negara maju pada saat mereka merintis pertumbuhan ekonomi modern. Semua negara baik yang menganut sistem kapitalis,



sosialis maupun campuran sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional.

Tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua bentuk atau jenis investasi bam yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Jadi menurut Kuznet dalam Todaro (2000:144) definisi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Karakteristik terjadinya proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui pada semua negara dengan meningkatnya pertumbuhan output, kenaikan total produktivitas, terjadinya transformasi struktur ekonomi, transformasi sosial dan ideologi, perluasan pemasaran dan masih terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi bagi penduduk. Karakteristik ini semuanya terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kekhasan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan PDRB yang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, produktivitas sektor makin meningkat, terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian kepada sektor lainnya yaitu sektor pertambangan. Perilaku masyarakat dan pola pikir telah terjadi transformasi sosial dengan meningkatnya keterbukaan sosial ekonomi. Kemampuan daya saing ekonomi daerah yang meningkat dan ekspansi pasar produk daerah namun pertumbuhan ini masih belum merata dengan masih terpusat pada kawasan yang kaya potensi sumber daya alam.

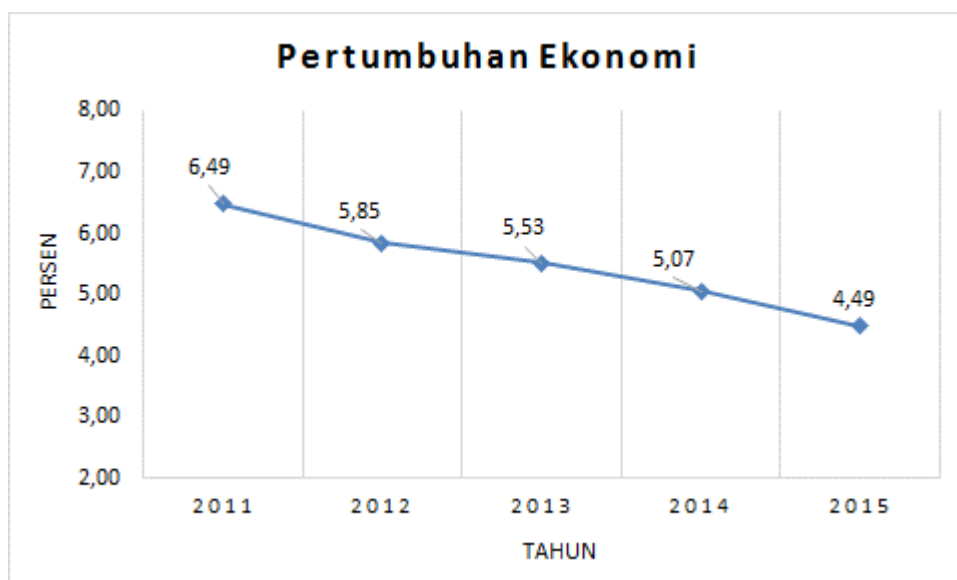
Tabel 5.33  
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
 Tahun 2011-2015 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	
Tanah Laut	6,97	5,97	5,33	4,84	3,82	5,39
Kotabaru	6,35	6,03	5,49	3,19	2,87	4,79
Ban jar	7,28	6,28	4,60	5,08	4,40	5,53
Barito Kuala	4,24	4,88	4,12	4,51	5,26	4,60
Tapin	6,55	6,32	5,75	5,44	4,05	5,62
Hulu Sungai Selatan	5,40	5,33	5,68	5,79	6,05	5,65
Hulu Sungai Tengah	5,98	4,85	5,83	5,56	6,12	5,67
Hulu Sungai Utara	6,42	5,40	5,34	5,99	5,34	5,70
Tabalong	7,23	5,33	4,36	4,03	2,41	4,67
Tanah Bumbu	7,91	6,29	3,80	2,74	2,94	4,74
Balangan	8,84	6,69	8,04	5,90	2,41	6,38
Banjarmasin	5,15	6,18	6,93	6,11	5,79	6,03
Banjarbaru	5,99	6,54	6,59	6,68	6,91	6,54
Rata-Rata	6,49	5,85	5,53	5,07	4,49	5,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 sebesar 5,48% **masih** lebih tinggi dari beberapa daerah yang rata-rata pertumbuhannya masih rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala (4,60%), Kotabaru (4,79%), Tabalong (4,67%). Tanah Bumbu (4,73%). Pertumbuhan ekonomi rata-rata tertinggi dicapai oleh Kota Banjarbaru (6,54%) dan Kabupaten Balangan (6,37%). kedua daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena daerah ini merupakan daerah tujuan investasi dengan nilai investasi swasta maupun investasi pemerintah yang besarnya cukup signifikan.

Kecenderungan (*trend*) pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut:



Gambar 5.3.

Trend Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015

Gambar 5.3 menunjukkan rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui cenderung menurun. Penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2012, yaitu ada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 adalah 0,50% per tahunnya.

#### 5.3.4. Penyerapan Tenaga Kerja

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di antaranya adalah mampu mengurangi tingkat pengangguran yaitu pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja sasaran pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja yang luas dan kualitas yang memadai agar menyerap tenaga kerja dan tambahan angkatan kerja yang masuk ke pasar kerja. Produsen harus bisa mengkombinasikan modal dan tenaga kerja agar mendapatkan laba maksimal. Para produsen diasumsikan untuk mampu memproduksi dengan proses teknologi padat karya hingga padat modal, jadi pada saat harga modal lebih mahal maka produsen akan memilih teknologi padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja.

Gambaran umum penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian sub sektor perkebunan terutama perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan karet adalah sektor yang banyak menyerap

tenaga kerja **sejak** jaman kolonial Belanda sampai sekarang, balikan 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan semuanya memiliki lahan perkebunan karet yang luas yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Sub sektor perkebunan komoditi kelapa sawit yang menjadi primadona penyumbang PDRB dan banyak menyerap tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir ini banyak menyerap tenaga kerja. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar pada 10 kabupaten yaitu Tabalong, Balangan, HSU, HSS, Tapin, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

Sektor ekonomi yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertambangan terutama komoditi batubara yang tersebar pada kabupaten Tabalong, Balangan, HSS, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sektor pertambangan ini walaupun padat modal namun tenaga kerja yang terserap cukup tinggi demikian pula usaha-usaha yang tumbuh mengiringinya sehingga sangat besar pengaruhnya bagi perekonomian daerah.

Tabel 5.34  
Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2011-2015 (%)

Kabupaten/Kota	Penyerapan Tenaga Kerja (%)					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	46,20	44,43	47,47	46,67	49,59	46,87
Kotabaru	44,45	44,64	40,85	46,90	43,45	44,06
Banjar	42,76	40,62	49,22	47,82	51,87	46,46
Barito Kuala	56,73	53,52	47,10	49,10	55,19	52,33
Tapin	48,09	51,53	63,50	68,33	46,75	55,64
Hulu Sungai Selatan	52,51	52,83	48,09	76,99	47,68	55,62
Hulu Sungai Tengah	51,05	51,07	47,81	49,59	52,44	50,39
Hulu Sungai Utara	56,00	56,93	49,14	49,88	53,07	53,01
Tabalong	48,21	46,94	48,94	47,98	49,08	48,23
Tanah Bumbu	37,95	38,22	41,78	44,06	40,82	40,57
Balangan	86,27	87,73	92,03	91,80	55,37	82,64
Banjarmasin	44,08	45,21	42,37	43,38	42,79	43,57
Banjarbaru	36,38	37,86	42,91	43,21	38,80	39,83
Rata-Rata	50,05	50,12	50,86	54,29	48,22	50,71

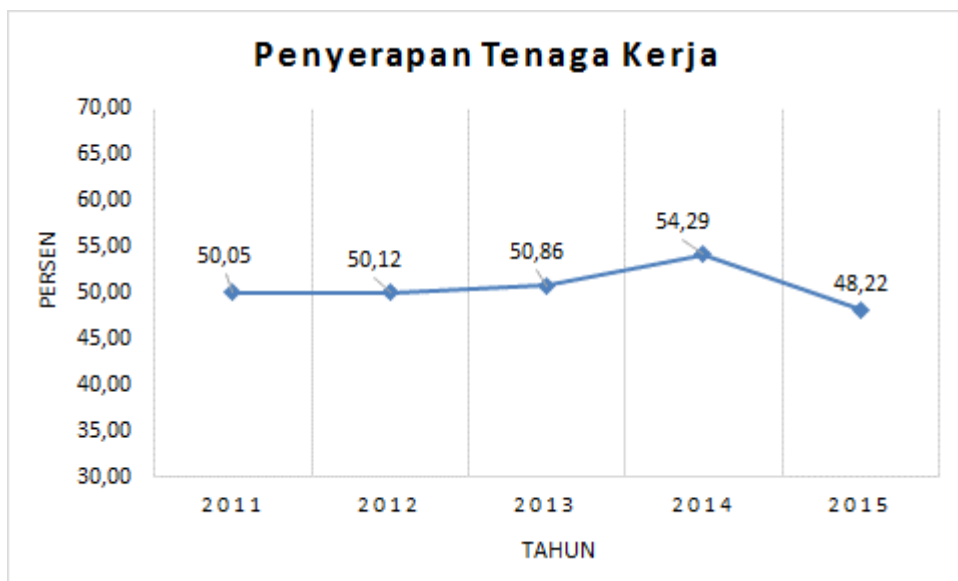
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Gambaran penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011-2015 mengalami peningkatan pada semua daerah. Secara rata-rata, penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi di Kabupaten Balangan (82,64%), selanjutnya Kabupaten Tapin (55,65%), Hulu Sungai Selatan (55,62%) dan Barito Kuala (52,33%). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di kabupaten/kota tersebut sebagian besar adalah penduduk produktif dalam usia kerja 15 tahun ke atas.

Kabupaten yang paling sedikit penyerapan tenaga kerja adalah Kabupaten Banjarbaru sebesar 39,83% dan Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 40,57%. Daerah ini kegiatan ekonominya andalannya adalah sektor pertambangan yang penyerapan tenaga kerja masyarakat lokalnya rendah karena padat modal dan tenaga kerja umumnya datang daerah-daerah lain. Di samping itu penduduk daerah ini juga cukup kecil dibanding daerah lain, sementara penduduk lokalnya sudah memiliki pekerjaan utama sendiri sehingga tidak banyak terserap pada sektor dengan investasi besar dan banyak menyerap tenaga kerja dengan keahlian tertentu.

Analisis secara rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja disimpulkan bahwa wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah Kabupaten Balangan (82,64%), dan wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah adalah Kabupaten Banjarbaru (39,83%).

Kecenderungan (*trend*) tingkat penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut:



Gambar 5.4.  
Trend Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2011-2015

Gambar 5.4 menunjukkan rata-rata penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui berfluktuasi, selama tahun 2011-2014 ada sedikit kecenderungan naik, sedangkan pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Penurunan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di tahun 2015, yaitu ada penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,06% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015, secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan ada kecenderungan menurun, akan tetapi ada 5 kabupaten yang penyerapan tenaga kerjanya naik, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **5.3.5. Tingkat Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)**

Menurut hasil empiris penelitian yang sudah banyak dilakukan bahwa konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup serta migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi akan berakibat membebani pertumbuhan ekonomi.

Walaupun korelasi statistik agregat antara ukuran kemiskinan antara ukuran kemiskinan dan penambahan penduduk tidak begitu jelas, namun berdasarkan pendapat Todaro (2000:285) bahwa penambahan penduduk akan mengakibatkan dampak negatif dengan bertambahnya penduduk miskin terutama penduduk yang paling miskin, dengan tidak memiliki lahan dan alat produksi sendiri sehingga menjadi korban dari langkah penghematan pemerintah dengan pembatasan pendanaan pembangunan.

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari segi persentase dan jumlah, bahkan di peringkat nasional berada di peringkat 3 dari 33 provinsi secara nasional pada tahun 2013, dengan IPM berada di peringkat 26 dari 33 provinsi secara nasional. Tabel 5.35 memperlihatkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu **2011-2015** yang setiap tahunnya mengalami penurunan.

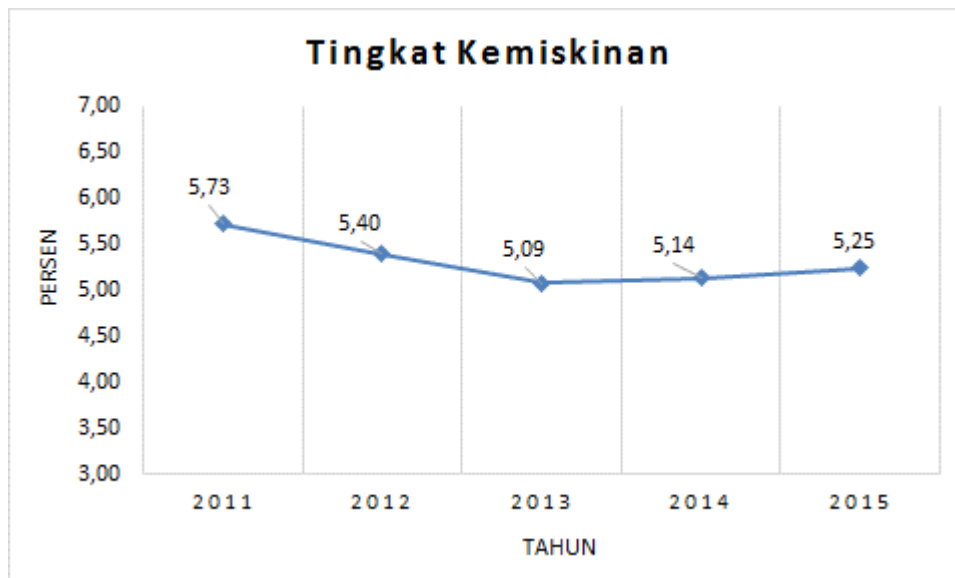
Tabel 5.35  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2011-2015 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	4,85	4,57	4,35	4,40	4,56	4,55
Kotabaru	5,17	4,88	4,75	4,79	4,60	4,84
Banjar	3,17	2,98	2,85	2,88	3,26	3,03
Barito Kuala	5,43	5,14	5,14	5,21	5,35	5,25
Tapin	5,31	5,01	3,43	3,64	3,86	4,25
Hulu Sungai Selatan	7,30	6,92	6,69	6,79	6,42	6,82
Hulu Sungai Tengah	6,02	5,69	5,59	5,66	5,79	5,75
Hulu Sungai Utara	7,36	6,97	6,95	7,03	7,07	7,07
Tabalong	6,22	5,86	6,17	6,24	6,56	6,21
Tanah Bumbu	5,99	5,52	5,24	5,24	5,51	5,50
Balangan	7,31	6,89	6,20	6,32	5,90	6,52
Banjarmasin	4,79	4,53	4,23	4,28	4,43	4,45
Banjarbaru	5,59	5,20	4,53	4,38	4,89	4,92
Rata-Rata	5,73	5,40	5,09	5,14	5,25	5,32

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015

Sejak tahun 2011-2015 persentase tingkat kemiskinan kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan terus menerus mengalami penurunan, hanya pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan kembali, sehingga pada tahun 2015 total penduduk miskin se Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 198.450 orang atau sebesar 5,32% dari total penduduk. Rata-rata terendah penduduk miskin adalah Kabupaten Banjar (3,03%) dan Kabupaten Tapin (4,25%), rendahnya penduduk miskin kedua daerah ini **disebabkan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar dengan sumber daya melimpah para penduduknya pada umumnya memiliki pekerjaan terutama sector** perkebunan karet dengan pada umumnya memadai, sementara daerah itu juga sektor pertambangan cukup besar sehingga peluang usaha dan kegiatan usaha cukup **berkembang**. Menurunnya tingkat kemiskinan ini menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum.

Kecenderungan (*trend*) tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.5 berikut:



Gambar 5.5.  
Trend Tingkat Kemiskinan Tahun 2011-2015

Gambar 5.5 menunjukkan rata-rata tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 diketahui berfluktuasi, selama tahun 2011-2013 ada kecenderungan turun, sedangkan pada tahun 2014-2015 tingkat kemiskinan mengalami sedikit kenaikan. Penurunan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2012 dan 2013, yaitu ada penurunan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,33% dan 0,31% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015, ada kenaikan tingkat kemiskinan masing-masing sebesar 0,06% dan 0,10%.

### 5.3.6. Disparitas Pendapatan

Disparitas pendapatan merupakan kesenjangan distribusi pendapatan antara individu atau kelompok masyarakat pada masing-masing kabupaten/kota yang diproksi dengan nilai Indeks Gini dalam satuan desimal. Indeks Gini ini menggunakan pendapatan individu atau kelompok masyarakat sebagai data dasar karena yang diperbandingkan adalah tingkat kemakmuran antar kelompok individu atau masyarakat. Data disparitas pendapatan berdasarkan Rasio Gini pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu **2011-2015** disajikan pada Tabel 5.36 berikut:



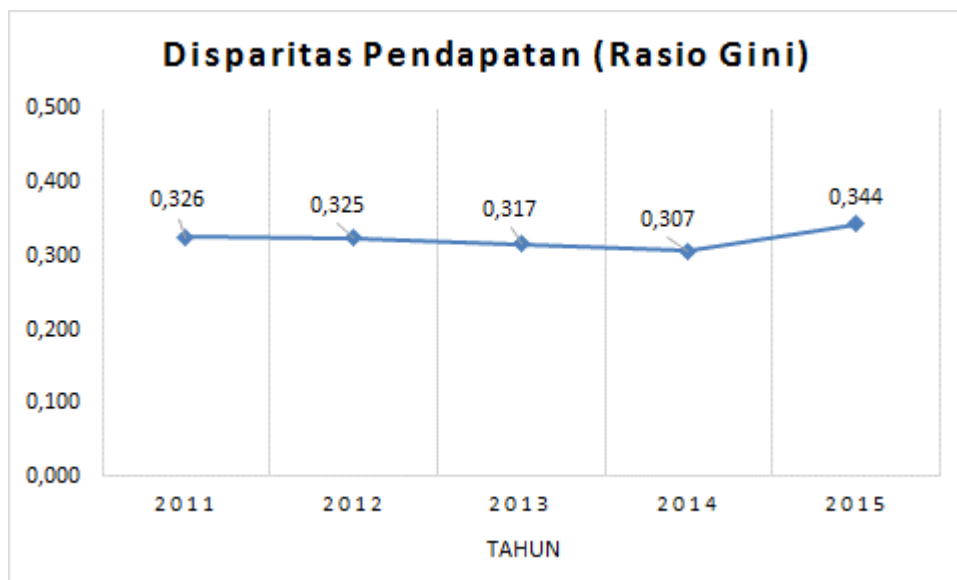
Tabel 5.36  
Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2011-2015 (dalam %)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Tanah Laut	0,327	0,324	0,332	0,347	0,349	0,336
Kotabaru	0,333	0,313	0,326	0,351	0,323	0,329
Banjarn	0,354	0,333	0,326	0,351	0,324	0,338
Barito Kuala	0,321	0,318	0,333	0,335	0,366	0,335
Tapin	0,258	0,295	0,279	0,265	0,345	0,288
Hulu Sungai Selatan	0,345	0,295	0,264	0,269	0,312	0,297
Hulu Sungai Tengah	0,290	0,301	0,301	0,279	0,327	0,300
Hulu Sungai Utara	0,283	0,293	0,259	0,266	0,359	0,292
Tabalong	0,345	0,327	0,332	0,297	0,285	0,317
Tanah Bumbu	0,348	0,319	0,329	0,294	0,333	0,325
Balangan	0,308	0,329	0,304	0,247	0,403	0,318
Banjarmasin	0,382	0,413	0,370	0,325	0,388	0,376
Banjarbaru	0,339	0,370	0,361	0,365	0,352	0,357
Rata-Rata	0,326	0,325	0,317	0,307	0,344	0,324

**Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2011-2015**

Sejak tahun 2011-2014 disparitas pendapatan berdasarkan Rasio Gini pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung menurun, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali. Rata-rata disparitas pendapatan tertinggi selama tahun 2011-2015 adalah Kota Banjarmasin (0,376), sedangkan disparitas pendapatan terendah adalah Kabupaten Tapin (0,288).

Kecenderungan (*trend*) disparitas pendapatan pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.6 berikut:



Gambar 5.6.

Trend Disparitas Pendapatan Tahun 2011-2015

Gambar 5.6 menunjukkan rata-rata disparitas pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 2011-2014 diketahui cenderung menurun, sedangkan pada tahun 2015 disparitas pendapatan mengalami sedikit kenaikan. Penurunan disparitas pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2014, yaitu ada penurunan disparitas pendapatan sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2013, sedangkan pada tahun 2015, ada kenaikan disparitas pendapatan sebesar 0,037.

#### 5.4. Hasil Analisis Data PLS (*Partial Least Square*)

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode PLS (*Partial Least Square*). Di dalam PLS, terdapat dua bagian utama dalam mengevaluasi model, yaitu evaluasi *measurement model (outer model)* dan evaluasi *structural model (inner model)*. *Evaluasi outer model* digunakan untuk menganalisis dan menguji validitas dan reliabilitas indikator pada setiap konstruk/ variabel, sedangkan evaluasi *inner model* digunakan untuk menganalisis dan menguji hubungan kausalitas antar variabel serta tingkat kesesuaian model (*goodness of fit*).

##### 5.4.1. Evaluasi *Outer Model*

Evaluasi *outer model* dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari indikator dan konstruk yang digunakan. Validitas diukur melalui *convergent validity* dan *discriminant validity*, sedangkan reliabilitas diukur melalui *composite reliability*. Evaluasi *outer model* dilakukan pada variabel dengan indikator reflektif, pada variabel dengan indikator reflektif mengasumsikan indikator saling terikat satu

sama lain dalam mencerminkan konstruk latennya (Jogiyanto dan Abdillah, 2014).

#### 5.4.1.1. Analisis Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

*Convergent validity* dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *outer loading*. *Rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen adalah *outer loading* > 0,50 dan *average variance extracted* (AVE) > 0,50 (Chin, 1995 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2014: 60). Indikator dikatakan valid juga bisa dinilai dari nilai T-statistics, dengan ketentuan apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 maka indikator tersebut dikatakan valid. Berikut ini adalah nilai *outer loading* untuk setiap indikator pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan.

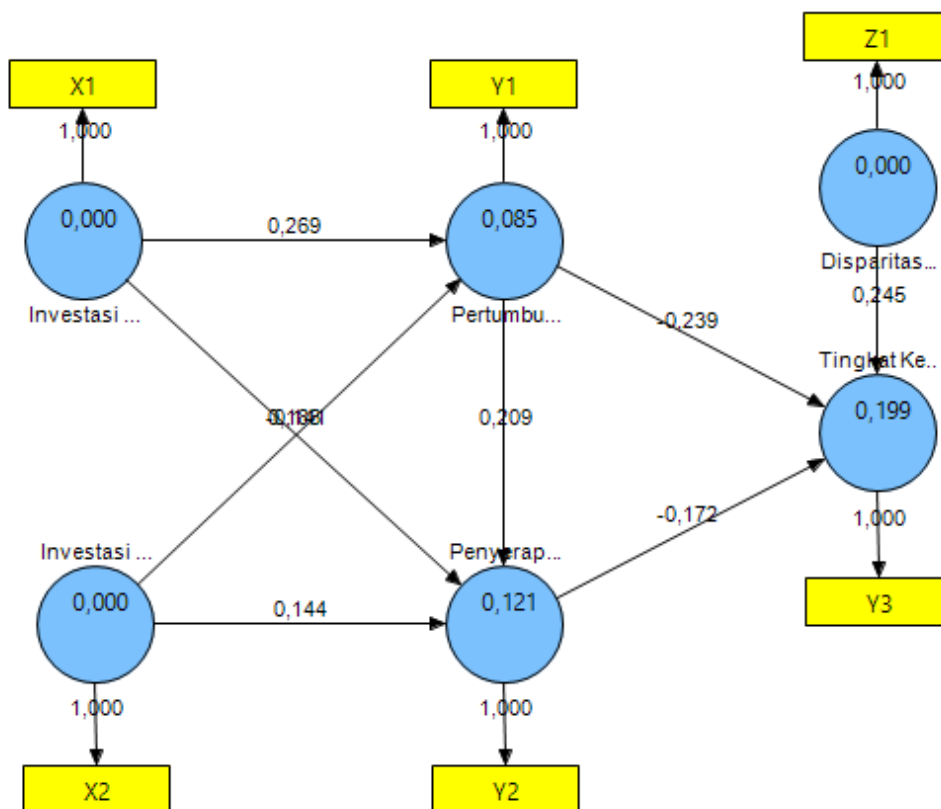
Tabel 5.37  
Nilai Outer Loading Setiap Indikator

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	<i>Cut-off value</i>	Keterangan
Investasi Pemerintah	X1	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Investasi Swasta	X2	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Pertumbuhan Ekonomi	Y1	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Penyerapan Tenaga Kerja	Y2	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Tingkat Pemiskinan	Y3	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Disparitas Pendapatan	Z	1,00	$\geq 0,50$	Valid

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan evaluasi *convergent validity* diketahui semua indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0,50, sehingga semua indikator tersebut disimpulkan valid dalam mengukur variabel yang diukur dan memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*) sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Hasil evaluasi *convergent validity* berdasarkan nilai *outer loading* untuk setiap indikator pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan juga bisa dilihat pada Gambar 5.7 berikut:



Gambar 5.7.  
Evaluasi Outer Loading Setiap Indikator  
(Sumber: Lampiran 10)

Selain menggunakan *outer loading* dan nilai T-statistics, pengujian validitas konvergen juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE untuk setiap konstruk investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disajikan pada tabel 5.38 berikut:

Tabel 5.38  
 Nilai AVE pada Evaluasi Outer Model

Variabel	AVE	Cut-off value	Keterangan
Investasi Pemerintah ( $X_1$ )	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Investasi Swasta ( $X_2$ )	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_2$ )	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Tingkat Kemiskinan ( $Y_3$ )	1,00	$\geq 0,50$	Valid
Disparitas Pendapatan ( $Z$ )	1,00	$\geq 0,50$	Valid

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan nilai AVE, semua konstruk/ variabel laten memiliki nilai AVE di bawah 0,50, yaitu investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan, sehingga indikator pada semua konstruk tersebut disimpulkan valid dalam mengukur variabel laten atau memenuhi validitas konvergen (*convergent validity*).

#### 5.4.1.2. Analisis Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

*Discriminant validity* dilihat berdasarkan nilai *cross loading* untuk setiap indikator pada konstruk yang dibentuk. Suatu indikator dikatakan memenuhi *discriminant validity* jika indikator tersebut memiliki nilai *cross loading* yang lebih besar pada konstruk yang dibentuk, dibandingkan terhadap konstruk yang lain. Hasil pengujian *discriminant validity* melalui perhitungan *cross loading* pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disajikan pada Tabel 5.39 di bawah.

Tabel 5.39  
Nilai Cross Loading Pada Evaluasi Outer Model

Indikator	Investasi Pemerintah	Investasi Swasta	Pertumbuhan Ekonomi	Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Kemiskinan	Disparitas Pendapatan
X1	<b>1,000</b>	0,093	0,256	0,226	-0,370	0,016
X2	0,093	<b>1,000</b>	-0,116	-0,151	0,076	-0,247
Y1	0,256	-0,116	<b>1,000</b>	0,273	-0,290	-0,015
Y2	0,226	-0,151	0,273	<b>1,000</b>	-0,318	-0,330
Y3	-0,370	0,076	-0,290	-0,318	<b>1,000</b>	0,305
Z1	0,016	-0,247	-0,015	-0,330	0,305	<b>1,000</b>
Ket.	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid	Valid

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan Tabel 5.39 diketahui semua indikator memiliki nilai *cross loading* lebih tinggi pada variabel yang dibentuknya dan rendah pada variabel yang lain, sehingga disimpulkan semua indikator pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disimpulkan valid dalam membentuk konstruk dan memenuhi *discriminant validity*.

Metode lain yang dapat digunakan untuk mengetahui *discriminant validity* adalah dengan membandingkan nilai dari akar *average variance extracted* (AVE) pada setiap variabel dengan nilai korelasi yang melibatkan variabel tersebut dengan variabel lainnya di dalam model. Jika nilai dari akar AVE lebih besar dibandingkan nilai korelasi-korelasi yang terjadi, maka variabel tersebut dapat dikatakan variabel memenuhi *discriminant validity*. Berikut adalah pengujian *discriminant validity* menggunakan perbandingan akar AVE dengan nilai korelasi antar variabel:

Tabel 5.40  
Pengujian Discriminant Validity Dengan Akar AVE

Variabel	Akar AVE	Korelasi Antar Variabel						
			X1	X2	Y1	Y2	Y3	Z
Investasi Pemerintah (X1)	1	X1	1					
Investasi Swasta (X2)	1	X2	0,093	1				
Pertumb. Ekonomi (Y1)	1	Y1	0,256	-0,116	1			
Penyerapan TK (Y2)	1	Y2	0,226	-0,151	0,273	1		
Tingkat Kemiskinan (Y3)	1	Y3	-0,370	0,076	-0,290	-0,318	1	
Disparitas Pendapatan (Z)	1	Z	0,016	-0,247	-0,015	-0,330	0,305	1

Sumber: Lampiran 10

Tabel 5.40 menunjukkan semua variabel memiliki nilai akar AVE lebih besar apabila nilai tersebut dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan memiliki *discriminant validity* yang baik dan memenuhi *discriminant validity*.

#### 5.4.1.3. Analisis Reliabilitas Konstruk (*Composite Reliability*)

Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai reliabilitas sedangkan *composite reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Chin dan Gopal, 1995 dalam Salisbury, *et al.*, 2002). *Composite reliability* dinilai lebih baik dalam menduga konsistensi internal suatu konstruk (Werts *et al.*, 1974 dalam Salisbury *et al.*, 2002). *Rule of thumb* nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* harus lebih besar dari 0,70, meskipun nilai 0,60 masih dapat diterima (Hair *et al.*, 2010 dalam Jogiyanto dan Abdillah, 2014:62).

Berikut adalah hasil perhitungan *cronbach alpha* dan *composite reliability* evaluasi *outer model* pada variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan:

Tabel 5.41  
Hasil Composite Reliability

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>	Keterangan
Investasi Pemerintah ( $X_1$ )	1,00	1,00	reliabel
Investasi Swasta ( $X_2$ )	1,00	1,00	reliabel
Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	1,00	1,00	reliabel
Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_2$ )	1,00	1,00	reliabel
Tingkat Kemiskinan ( $Y_3$ )	1,00	1,00	reliabel
Disparitas Pendapatan ( $Z$ )	1,00	1,00	reliabel

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan Tabel 5.41 di atas terlihat semua variabel memiliki nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* lebih besar dari 0,70, sehingga variabel investasi pemerintah, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan disparitas pendapatan disimpulkan reliabel/ handal.

#### 5.4.1.4. Ringkasan Hasil Evaluasi *Outer Model*

Hasil evaluasi *outer model* berdasarkan uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji validitas diskriminan (*discriminant validity*), dan uji reliabilitas komposit (*composite reliability*) menunjukkan semua indikator valid sehingga juga berdampak pada tingkat reliabilitas variabel yang besar dan memenuhi dari nilai yang dipersyaratkan. Dengan demikian semua indikator selanjutnya dikeluarkan dapat digunakan untuk menyusun model penelitian, dan selanjutnya model dapat dilakukan evaluasi *inner model*.

#### 5.4.2. Evaluasi *Inner Model*

Model struktural (*inner model*) dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan  $R^2$  dan  $Q^2$  untuk konstruk dependen, dan nilai koefisien *path* atau *t-value* (*t-statistics*) untuk uji signifikansi antar konstruk. Semakin tinggi nilai  $R^2$  dan  $Q^2$  berarti semakin baik prediksi dari model yang diajukan. Skor koefisien *path* atau *inner model* yang ditunjukkan nilai *t-statistics* harus di atas 1,96 untuk pengujian hipotesis pada *alpha* (tingkat kesalahan penelitian) sebesar 5% (Jogiyanto dan Abdillah, 2014: 63).

##### 5.4.2.1. Analisis *R-square* dan *Q-square*

Berdasarkan pengolahan data dengan PLS, dihasilkan nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebagai berikut:



Tabel 5.42  
Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R Square</i>
Investasi Pemerintah ( $X_1$ )	-
Investasi Swasta ( $X_2$ )	-
Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	0,085
Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_2$ )	0,121
Tingkat Kemiskinan ( $Y_3$ )	0,199
Disparitas Pendapatan ( $Z$ )	-

Sumber: Lampiran 10

*Goodness of fit* pada model PLS dapat diketahui dari nilai  $R^2$ . Semakin tinggi  $R^2$ , maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Nilai *R-square* pada variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0,085 artinya besarnya pengaruh investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi adalah hanya sebesar 8,5%. Nilai *R-square* pada variabel penyerapan tenaga kerja adalah 0,121 artinya besarnya pengaruh investasi pemerintah, investasi swasta, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 12,1%. Sedangkan nilai *R-square* pada variabel tingkat kemiskinan adalah 0,199 artinya besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 19,9%.

Pada model PLS, penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai  $Q^2$ . Nilai  $Q^2$  memiliki arti yang sama dengan koefisien determinasi (*R-Square*) pada analisis regresi, di mana semakin tinggi *R-Square*, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data. Dari Tabel 4.28 dapat dihitung nilai  $Q^2$  sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai } Q^2 &= 1 - (1 - 0,085) \times (1 - 0,121) \times (1 - 0,199) \\ &= 0,355 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan diketahui nilai  $Q^2$  sebesar 0,355, artinya besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model struktural yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebesar 35,5%.

#### 5.4.2.2. Evaluasi *Goodness of Fit*

Hasil pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) pada analisis PLS dilakukan dengan menggunakan statistik SRMR,  $d_{ULS}$ ,  $d_G$ , *Chi Square*, dan NFI, yang disajikan pada Tabel 5.43 berikut:

Tabel 5.43  
Evaluasi *Goodness Of Fit*

Kriteria	<i>Cut off</i> (syarat)	Hasil model	Keterangan
SRMR	$\leq 0,08$	0,067	Fit
d_ULS	$\leq 0,95$	0,093	Fit
d_G	$\leq 0,95$	0,022	Fit
<i>Chi-square</i>	$\leq 12,59$	7,341	Fit
NFI	$\geq 0,90$	0,624	Tidak fit

Sumber: Lampiran 10

Hasil pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) menunjukkan bahwa model penelitian telah sesuai dengan data atau fit terhadap data. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.43 yang menunjukkan nilai SRMR, d\_ULS, d\_G, dan *Chi Square* yang telah sesuai dengan *cutt of* yang dipersyaratkan dalam kesesuaian model. Ada satu kriteria kesesuaian model yang tidak fit, yaitu NFI. Hasil evaluasi *goodness of fit* menunjukkan bahwa dengan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, model yang disusun peneliti sudah fit, dan nilai NFI yang masih rendah menunjukkan perlunya menambahkan variabel-variabel lainnya pada penelitian selanjutnya, agar nilai NFI semakin besar, yang artinya masih perlu dimasukkan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini juga dikuatkan oleh nilai  $Q^2$  pada evaluasi sebelumnya yang menunjukkan angka 35,5%.

#### 5.4.2.3. Koefisien *Inner Weight*

Kekuatan pengaruh antar variabel (konstruk) dapat dianalisis melalui koefisien jalur dari semua garis dengan anak panah satu ujung. Berikut adalah hasil estimasi koefisien pengaruh antar variabel dengan menggunakan PLS :

Tabel 5.44.  
Nilai Koefisien PLS Pengaruh Antar Variabel

Pengaruh Antar Variabel		Nilai <i>Original Sample</i> (O) atau koefisien <i>path</i>
Investasi Pemerintah ( $X_1$ )	→ Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	0,269
Investasi Pemerintah ( $X_1$ )	→ Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_2$ )	0,186
Investasi Swasta ( $X_2$ )	→ Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	0,141
Investasi Swasta ( $X_2$ )	→ Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_2$ )	0,144
Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )	→ Penyerapan Tenaga Kerja ( $Y_2$ )	0,209

Sumber: Lampiran 10

Penjelasan analisis koefisien *path* pengaruh antar variabel pada Tabel 5.44 di atas adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi oleh investasi pemerintah karena memiliki koefisien pengaruh terbesar, yaitu sebesar 0,269. Selanjutnya adalah investasi swasta (0,141).
2. Penyerapan tenaga kerja lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi karena memiliki koefisien pengaruh terbesar, yaitu sebesar 0,209. Selanjutnya adalah investasi pemerintah (0,186), dan investasi swasta (0,144).

### 5.5. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah analisis koefisien pengaruh antar variabel, tahap selanjutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan nilai *t-statistics*. Parameter ada tidaknya pengaruh secara parsial dapat diketahui berdasarkan nilai *t-statistics*, dengan ketentuan melalui perbandingan *t-statistics* > 1,96 maka ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen atau variabel endogen terhadap variabel endogen. Sebaliknya jika *t-statistics* < 1,96 maka tidak ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen atau variabel endogen terhadap variabel endogen.

Tabel 5.45  
Pengujian Hipotesis Dengan *Inner Weight*

Hip.	Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Path	T stat.	Keterangan
H <sub>1</sub>	Investasi Pemerintah (X <sub>1</sub> ) → Pertumbuhan Ekonomi (Y <sub>1</sub> )	0,269	3,926	Signifikan
H <sub>2</sub>	Investasi Pemerintah (X <sub>1</sub> ) → Penyerapan Tenaga Kerja (Y <sub>2</sub> )	0,186	1,822	Tidak signifikan
H <sub>3</sub>	Investasi Swasta (X <sub>2</sub> ) → Pertumbuhan Ekonomi (Y <sub>1</sub> )	0,141	1,518	Tidak signifikan
H <sub>4</sub>	Investasi Swasta (X <sub>2</sub> ) → Penyerapan Tenaga Kerja (Y <sub>2</sub> )	0,144	3,292	Signifikan
H <sub>5</sub>	Pertumbuhan Ekonomi (Y <sub>1</sub> ) → Penyerapan Tenaga Kerja (Y <sub>2</sub> )	0,209	2,549	Signifikan

Sumber: Lampiran 10

Dari Tabel 5.45 di atas dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,269 dengan nilai *T-statistics* sebesar 3,926, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin

besar investasi pemerintah pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat diterima (**H<sub>1</sub> diterima**).

2. Besarnya pengaruh investasi pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,186 dengan nilai *T-statistics* sebesar 1,822, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih kecil dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi pemerintah berpengaruh tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin besar investasi pemerintah pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berdampak kecil pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan investasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, tidak dapat diterima (**H<sub>2</sub> ditolak**).
3. Besarnya pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,141 dengan nilai *T-statistics* sebesar 1,518, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih kecil dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi swasta berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin besar investasi swasta pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berdampak kecil pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak dapat diterima (**H<sub>3</sub> ditolak**).
4. Besarnya pengaruh investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,144 dengan nilai *T-statistics* sebesar 3,292, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin besar investasi swasta pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dapat diterima (**H<sub>4</sub> diterima**).
5. Besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 0,209 dengan nilai *T-statistics* sebesar 2,549, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, dapat diterima (**H<sub>5</sub> diterima**).

### Pengujian Pengaruh Moderasi

Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Jogiyanto dan Abdillah (2014), pengujian efek moderasi pada PLS dapat dilakukan apabila pengaruh variabel independen terhadap dependen signifikan, dan pengaruh variabel moderasi terhadap variabel dependen juga harus signifikan. Hasil analisis PLS menunjukkan syarat tersebut terpenuhi, karena pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah signifikan, serta pengaruh disparitas pendapatan terhadap tingkat kemiskinan juga signifikan, sehingga pengujian efek moderasi bisa dilanjutkan.

Pada penelitian ini, akan diuji efek moderasi disparitas pendapatan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, yang hasilnya disajikan pada Tabel 5.46 berikut:

Tabel 5.46  
Pengujian Hipotesis Pengaruh Moderasi

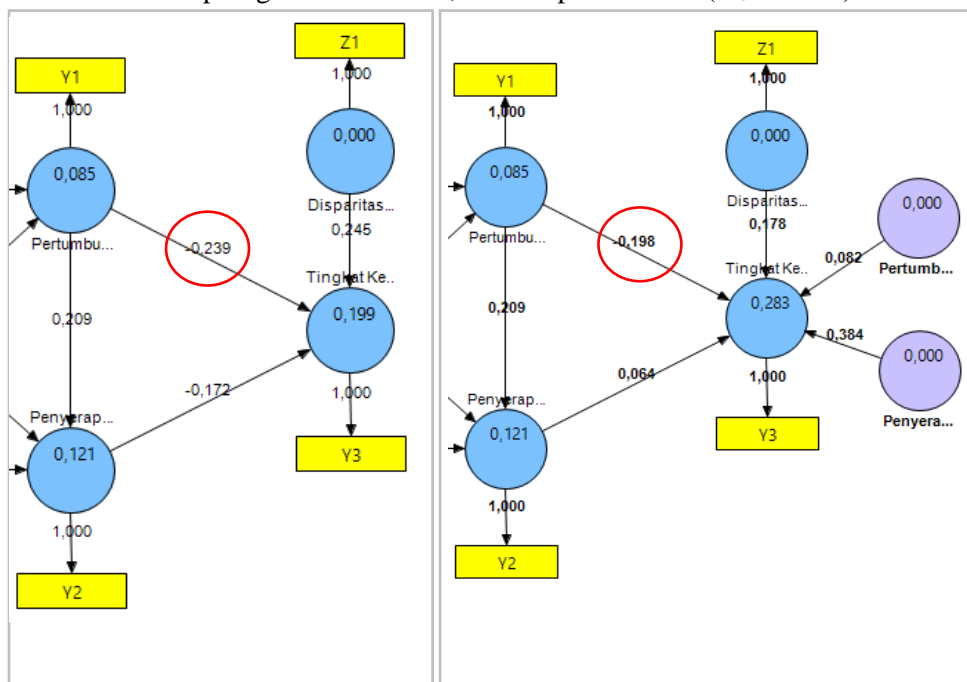
Hip.	Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Path	T stat.	Keterangan
H <sub>6</sub>	Pertumbuhan Ekonomi * Disparitas Pendapatan (Y <sub>1</sub> *Z) → Tingkat Kemiskinan (Y <sub>3</sub> )	0,082	0,868	Moderasi tidak signifikan
H <sub>7</sub>	Penyerapan Tenaga Kerja * Disparitas Pendapatan (Y <sub>2</sub> *Z) → Tingkat Kemiskinan (Y <sub>3</sub> )	0,384	3,264	Moderasi signifikan

Sumber: Lampiran 11

Dari Tabel 5.46 di atas dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh interaksi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan (Y<sub>1</sub>\*Z) terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,082 dengan nilai *T-statistics* sebesar 0,868, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih kecil dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sama, baik pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah ataupun tinggi. Dengan demikian, hipotesis keenam yang

menyatakan disparitas pendapatan memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, tidak dapat diterima (**H<sub>6</sub> ditolak**).

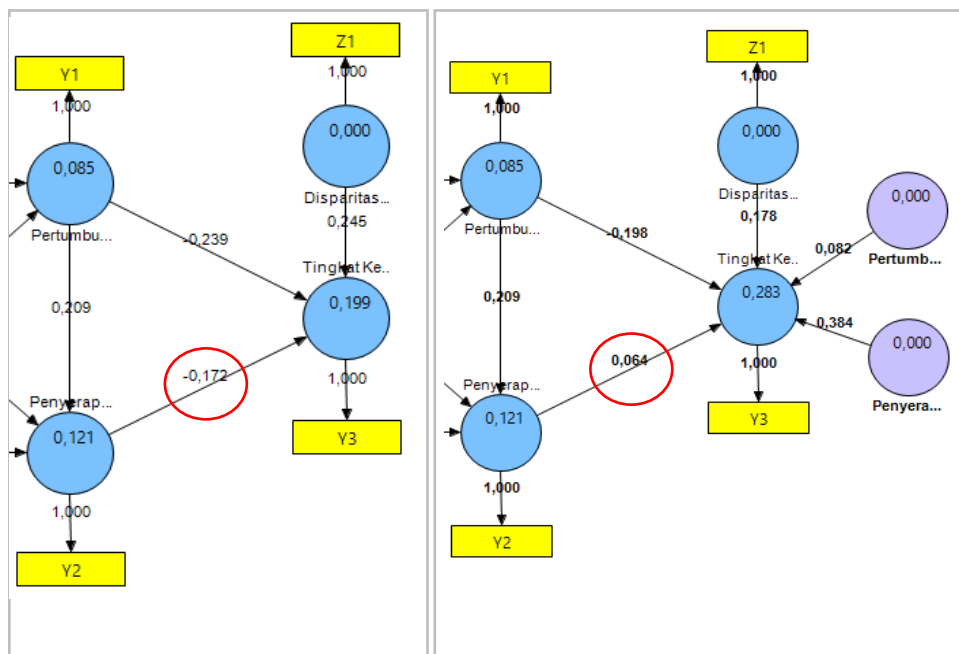


Gambar 5.8  
Visualisasi Pengaruh Moderasi Y1\*Z Terhadap Y3

Gambar 5.8. menunjukkan sebelum ada efek moderasi, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar -0,239. Hasil uji efek moderasi menunjukkan koefisien pengaruh variabel interaksi Y<sub>1</sub>\*Z adalah sebesar 0,082 (positif), nilai positif menunjukkan efek moderasi ke arah kanan, karena pengaruh sebelumnya adalah -0,239, maka semakin ke arah kanan menunjukkan pengaruh negatif yang semakin mengecil, atau dengan kata lain dikatakan moderasi disparitas pendapatan adalah memperlemah pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Memperlemah pengaruh negatif dikuatkan dengan perubahan koefisien pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, sebelum ada pengaruh moderasi adalah sebesar -0,239, setelah ada moderasi disparitas pendapatan maka pengaruh negatifnya mengecil menjadi -0,198. Perlemahan pengaruh dari -0,239 menjadi -0,198 tersebut diputuskan tidak signifikan karena nilai T-stat masih lebih kecil dari 1,96.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada semua daerah, baik pada

- kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan tinggi maupun pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah.
2. Besarnya pengaruh interaksi penyerapan tenaga kerja dan disparitas pendapatan ( $Y2*Z$ ) terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar 0,384 dengan nilai *T-statistics* sebesar 3,264, di mana nilai *T-statistics* tersebut lebih besar dari 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah berbeda pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan rendah dan kabupaten dengan disparitas pendapatan tinggi. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi disparitas pendapatan sebuah kabupaten/ kota, maka akan memperlemah pengaruh negatif dari penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dengan kata lain, pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan tinggi maka tingginya penyerapan tenaga kerja tidak memberikan dampak yang besar pada penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis ketujuh yang menyatakan disparitas pendapatan memoderasi pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, dapat diterima (**H<sub>7</sub> diterima**).



Gambar 5.9  
Visualisasi Pengaruh Moderasi  $Y2*Z$  Terhadap P  $Y3$

Gambar 5.9 menunjukkan sebelum ada efek moderasi, pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan adalah sebesar  $-0,171$ . Hasil uji efek moderasi menunjukkan koefisien pengaruh variabel interaksi  $Y_2*Z$  adalah sebesar  $0,384$  (positif), nilai positif menunjukkan efek moderasi ke arah kanan, karena pengaruh sebelumnya adalah  $-0,171$ , maka semakin ke arah kanan menunjukkan pengaruh negatif yang semakin mengecil, atau dengan kata lain moderasi disparitas pendapatan adalah memperlemah pengaruh negatif dari penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan. Memperlemah pengaruh negatif dikuatkan dengan perubahan koefisien pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan, sebelum ada pengaruh moderasi adalah sebesar  $-0,171$ , setelah ada moderasi disparitas pendapatan maka pengaruh negatifnya mengecil bahkan menjadi positif sebesar  $0,064$ . Perlemahan pengaruh dari  $-0,171$  menjadi  $0,064$  tersebut diputuskan cukup signifikan karena nilai T-stat lebih besar dari  $1,96$ .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang rendah, sedangkan pada kabupaten/ kota dengan disparitas pendapatan yang tinggi, pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan menjadi tidak berpengaruh.